

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi-

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatsan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

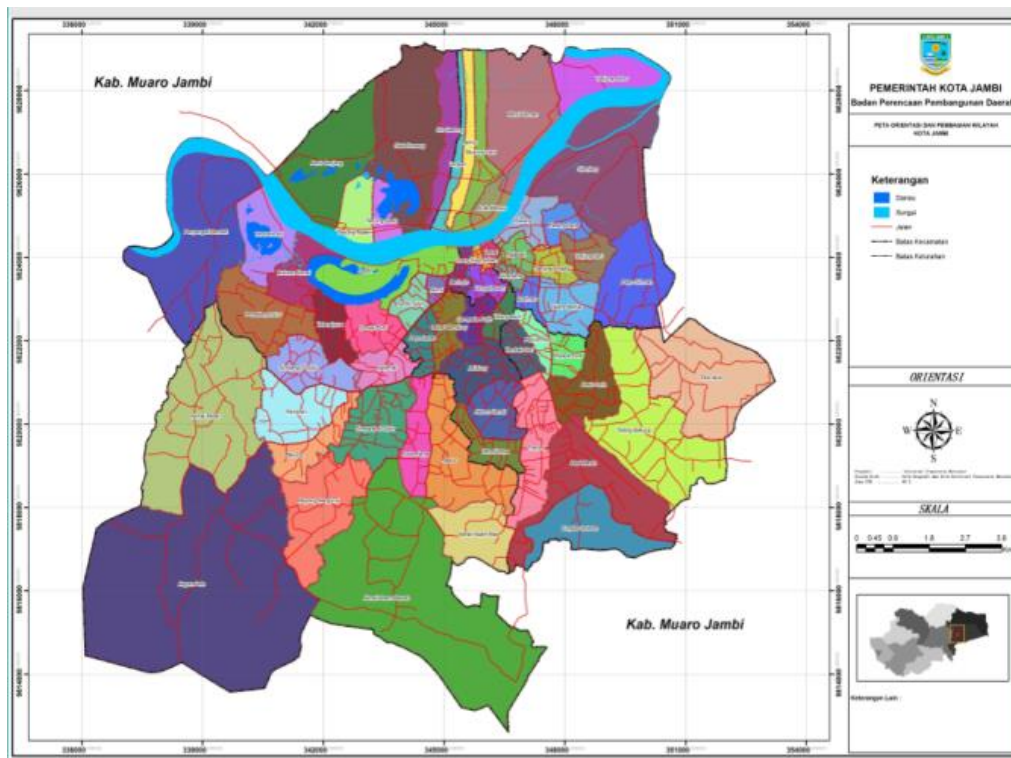
Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM². Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
Jumlah		175,53	100	62

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

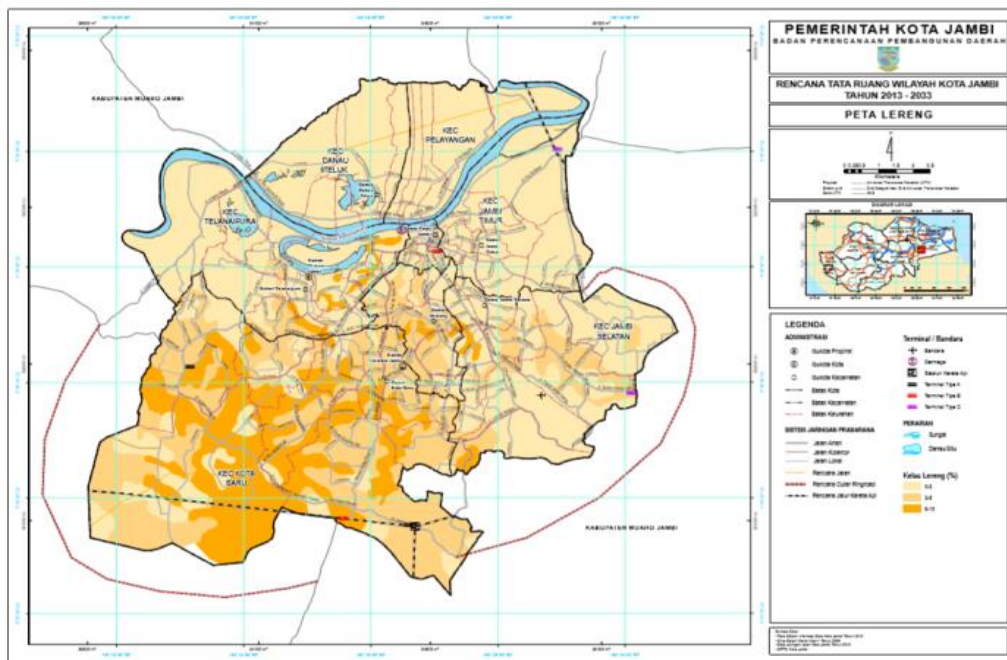
Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

2.1.1.2. Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.



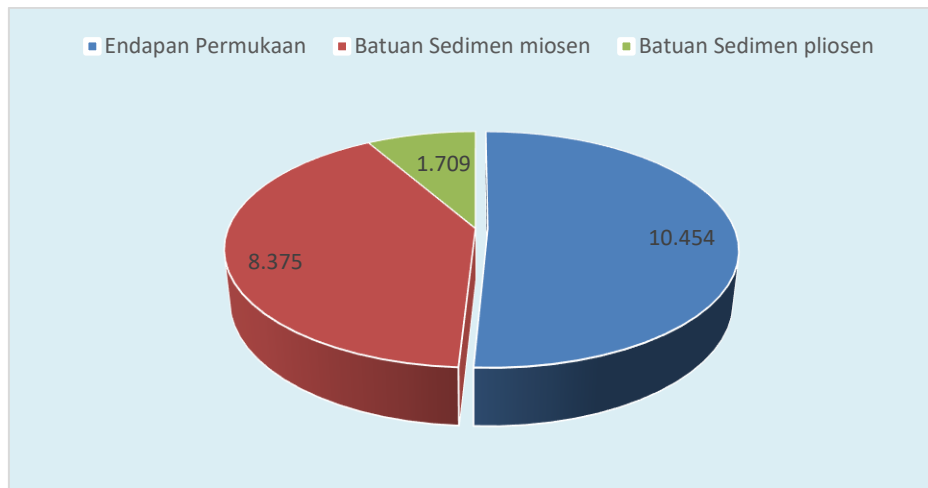
Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Jambi

2.1.1.3. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Berdasarkan luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar mencapai 50,90% dari total wilayah Kota Jambi, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar (40,78%) dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar (8,32%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

Gambar 2.3.
Struktur Geologi Kota Jambi

2.1.1.4. Klimatologi

Pada Tahun 2020 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada April–Oktober, sementara musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada Oktober–April. Musim kemarau umumnya terjadi pada Mei sampai September dan musim hujan terjadi pada Oktober sampai April.

Selama tahun 2020 kelembaban udara rata-rata terendah 79% pada bulan Agustus, sedangkan tertinggi sebesar 85% pada bulan Mei. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2020 terjadi pada bulan Oktober yaitu 368,1 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan Februari yaitu 86,1 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari dan Mei sebanyak 22 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 7 hari terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Rata-rata kelembaban udara, Jumlah Curah Hujan
dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2020

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
	Maks	Min	Rata-rata		
Januari	97	57	83	152,2	22
Februari	97	54	81	86,1	12
Maret	98	55	81	231,8	20
April	97	52	82	205,3	21

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
	Maks	Min	Rata-rata		
Mei	98	62	85	219,8	22
Juni	97	56	84	94,7	15
Juli	97	54	84	198,3	15
Agustus	96	50	79	95,9	7
September	98	54	82	182,2	19
Oktober	96	55	82	368,1	20
November	97	52	83	264,9	20
Desember	97	52	81	324,4	16

Sumber : BPS Kota Jambi, 2020

2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikitnya terdapat 5 (lima) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

Sungai ini melewati Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Kenali terus ke Danau Sipin dan akhirnya bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kambang

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi sebagian Kelurahan Simpang III Sipin di Kecamatan Kota Baru dan Kelurahan Simpang IV Sipin.

3. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru (yaitu meliputi sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah, sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas, Kelurahan Sukakarya, Kelurahan Simpang III Sipin dan Kelurahan Paal Lima), Kecamatan Jelutung (yaitu meliputi Kelurahan Jelutung, Kelurahan Lebak Bandung dan Kelurahan Cempaka Putih), Kecamatan Pasar Jambi (meliputi Kelurahan Beringin dan Kelurahan Orang Kayo Hitam).

4. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi sebagian Kecamatan Thehok, Kelurahan Tambak Sari, sebagian Kelurahan Kebon Handil, Kelurahan Jelutung, sebagian Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, sebagian Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Kasang.

5. Sungai Selincih

Daerah pengaliran Sungai Selincih meliputi Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Sijenjang.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

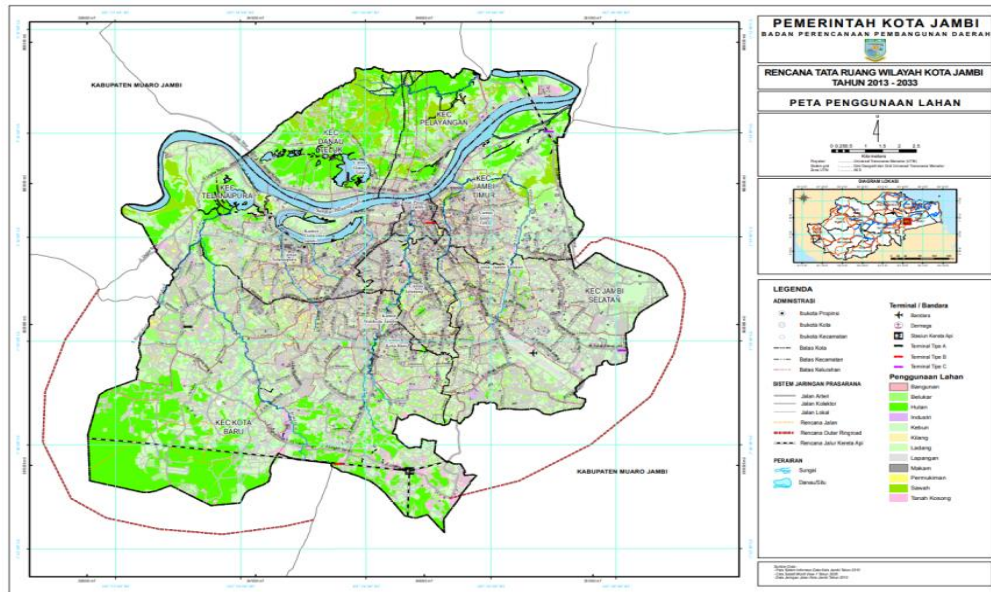
2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Hasil pengolahan citra satelit Kota Jambi Tahun 2018 yang memperhatikan kemajuan pembangunan Tahun 2020 dengan skala peta 1:5.000 menunjukkan persentase tertinggi pada penggunaan tanah campuran sebesar 26,62%, Pekarangan sebesar 23,73% dan Bangunan 17,39%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Badan Air	1.108,59	6,53
Bangunan	2.952,50	17,39
Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	4,92	0,03
Hutan Rawa/Gambut	129,11	0,76
Hutan Rimba	21,46	0,13
Jalan	686,45	4,04
Padang Golf	12,79	0,08
Pasir/Bukit Pasir Darat	9,58	0,06
Pekarangan	4.030,24	23,73
Perkebunan/Kebun	568,50	3,35
Permukaan/Lapangan diperkeras	91,49	0,54
Rumput	575,14	3,39
Sawah	333,46	1,96
Semak Belukar	674,34	3,97
Tanah Kosong	616,47	3,63
Tanah Campuran	4.521,72	26,62
Tegalan/Ladang	646,07	3,80
Utilitas	1,32	0,01
Jumlah	16.984,15	100

Sumber: Peta Citra Satelit 2013, 2018 (data diolah)



Gambar 2.4.
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

- Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan – kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi – lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

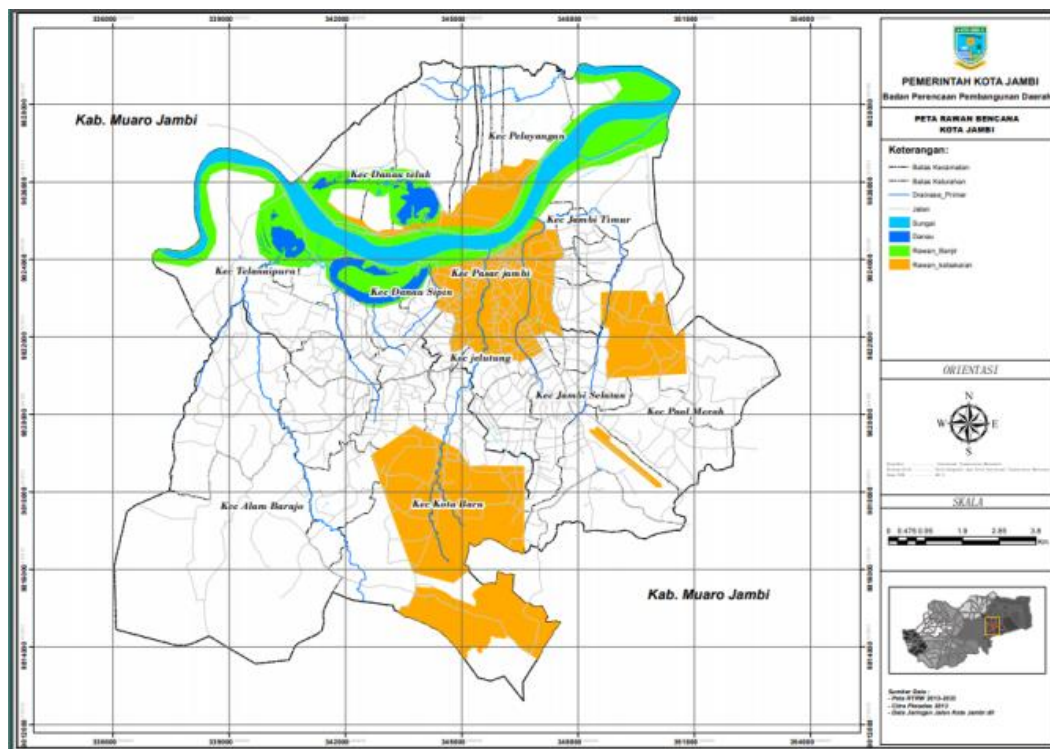
Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- Kecamatan Danau Teluk;
- Kecamatan Pelayangan

- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2017

Gambar 2.5.
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

2.1.2. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

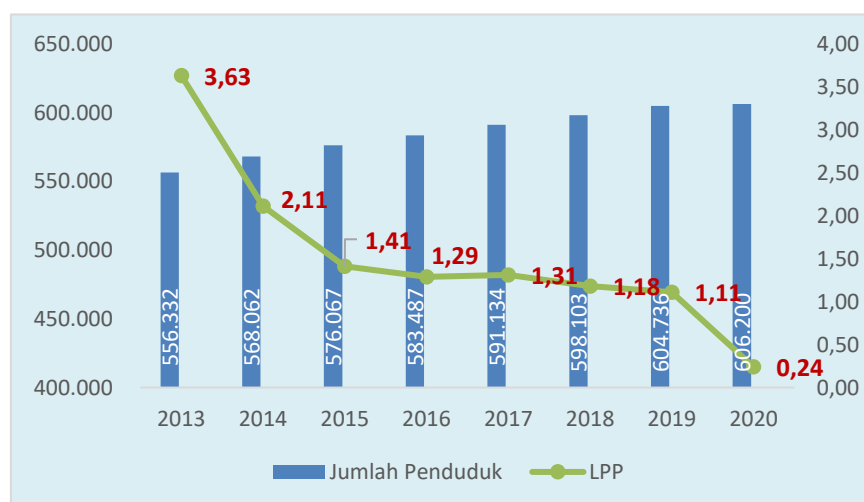
Setiap Tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus meningkat menjadi 606.200 jiwa pada tahun 2020. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap Tahun selama kurun waktu 2013-2020 berkisar antara 0,24% sampai dengan 3,63% pertahunnya, dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,54%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi dari Tahun 2013-2020.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2013	556.332	3,63
2014	568.062	2,11
2015	576.067	1,41
2016	583.487	1,29
2017	591.134	1,31
2018	598.103	1,18
2019	604.736	1,11
2020	606.200	0,24
		1,54

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu Tahun 2013-2020 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya atau terjadi pertumbuhan negatif, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.6.
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013 – 2020

Penduduk Kota Jambi Tahun 2020 sebanyak 606.200 jiwa yang terdiri atas 305.407 jiwa penduduk laki-laki dan 300.793 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019. Pada Tahun 2020 penduduk Kota Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 persen dengan rasio jenis kelamin 100,96.

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap Tahunnya, yaitu berkisar antara 100,96 sampai dengan 101,53 untuk kurun waktu Tahun 2013 - 2020. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin

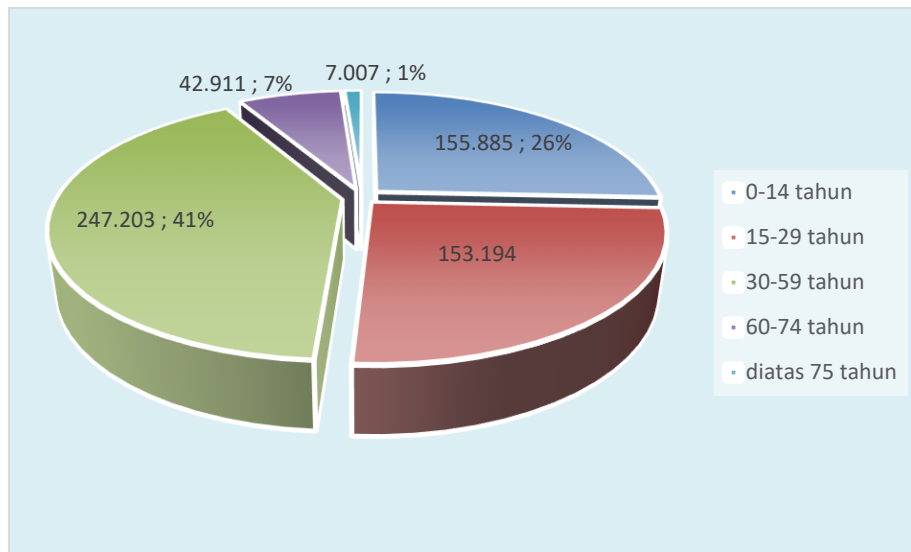
Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2013	286.289	50,29	283.042	49,71	569.331	101,00
2014	285.492	50,26	282.570	49,74	568.062	101,01
2015	289.713	50,29	286.354	49,71	576.067	101,17
2016	293.217	50,25	290.270	49,75	583.487	101,03
2017	297.036	50,25	294.098	49,75	591.134	101,15
2018	300.566	50,25	297.537	49,75	598.103	101,02
2019	303.818	50,24	300.918	49,76	604.736	100,96
2020	305.407	50,38	300.793	49,62	606.200	101,53

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Pada tahun 2020 jumlah usia produktif di Kota Jambi sebesar 247.203 jiwa atau sebesar 41 % dibandingkan total penduduk. Jumlah penduduk Tahun 2020 berdasarkan Struktur Usia dapat dilihat pada gambar berikut.

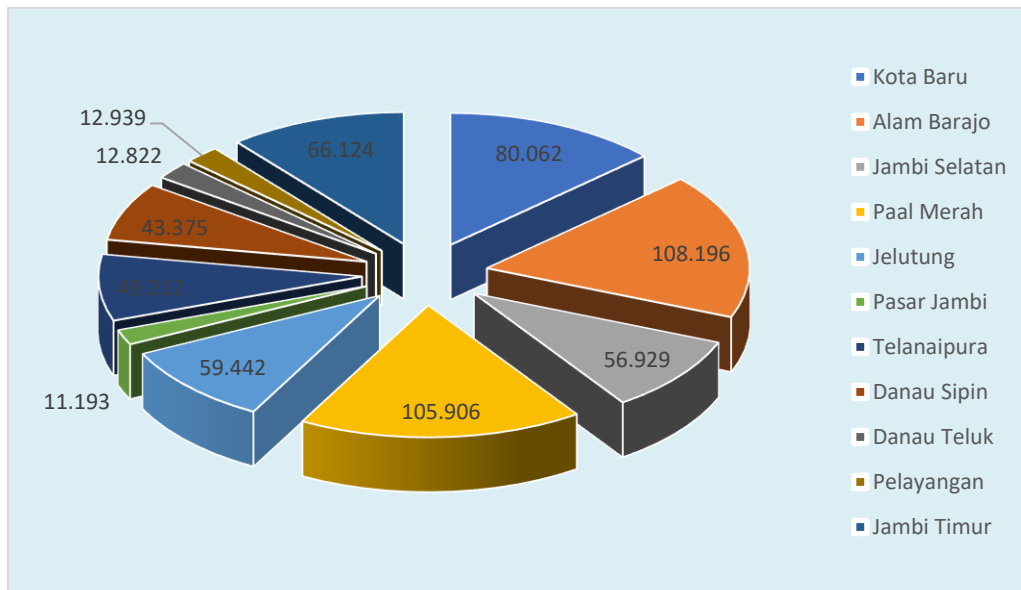


Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.7.

Jumlah Penduduk Kota Jambi berdasar Struktur Usia Tahun 2020

Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 108.196 jiwa atau sekitar 17,85 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 105.906 jiwa atau 17,47 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 80.062 jiwa atau sekitar 13,21 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 11.193 jiwa, atau 1,85 persen dari total penduduk Kota Jambi. Distribusi penduduk kota Jambi Tahun 2020 terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2.8.
Distribusi penduduk kota Jambi Tahun 2020

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru dikarenakan ketiga kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah dan Kota Baru juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi Tahun 2020 mencapai 3.384 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jelutung sebesar 7.505 Jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Pelayangan sebesar 187 jiwa/Km².

Berdasarkan kepadatannya pada tahun 2020, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jelutung 7.905 Jiwa/Km², Kecamatan Danau Sipin 5.504 jiwa/km² dan Kecamatan Jambi Selatan 4.898 jiwa/km². Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 817 Jiwa/Km² hingga 4.148 Jiwa/Km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sangat besar sebaran penduduk di 3 (tiga) kecamatan kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020
berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)							
		(Km ²)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kotabaru	26,26	2.798	2.655	2.729	2.799	2.870	2.131	2.994	2.217
2.	Alam Barajo	39,87	2.056	2.254	2.317	2.377	2.492	2.386	2.542	2.597
3.	Jambi Selatan	7,51	8.320	7.953	8.053	8.139	8.245	5.464	8.376	4.898
4.	Paal Merah	23,77	3.517	3.667	3.709	3.744	3.873	3.341	3.844	3.904
5.	Jelutung	7,64	8.365	8.124	8.181	8.234	7.989	8.055	8.405	7.905
6.	Pasar Jambi	1,68	7.885	7.513	7.496	7.474	7.174	3.109	7.420	2.784
7.	Telanaipura	19,2	2.250	2.553	2.578	2.603	2.688	2.264	2.680	2.186
8.	Danau Sipin	7,28	5.960	6.432	6.496	6.557	6.630	6.179	6.752	5.504
9.	Danau Teluk	15,21	786	786	789	791	791	772	799	817
10.	Pelayangan	12,78	1.030	1.037	1.046	1.054	1.055	896	1.080	846
11.	Jambi Timur	14,33	4.602	4.596	4.616	4.634	4.658	4.255	4.692	4.148
Kota Jambi		175,53	3.169	3.236	3.282	3.324	3.384	3.532	4.508	3.437

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013, pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan
- b) peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi :
 - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan

b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

- pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
- Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
- Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi Tahun 2020

NO	URAIAN	2020
1	UHH (Tahun)	72,65
2	HLS (Tahun)	15,1
3	RLS (Tahun)	10,92
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp 000)	12.056
	IPM	78,37

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

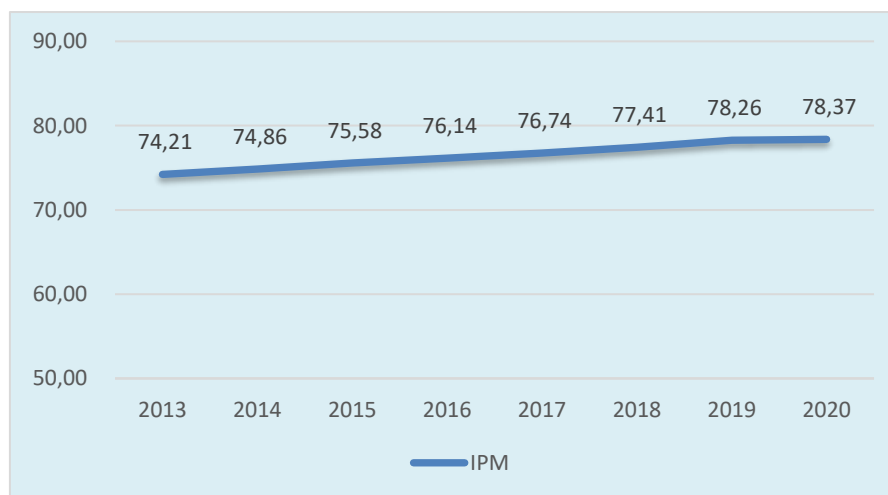
Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.9.
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,21 poin meningkat menjadi 78,37 poin pada Tahun 2020 atau mengalami

kenaikan 4,16 poin. Peningkatan indeks pembangunan manusia menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah maupun hidup layak semakin panjang.

2. Kemiskinan

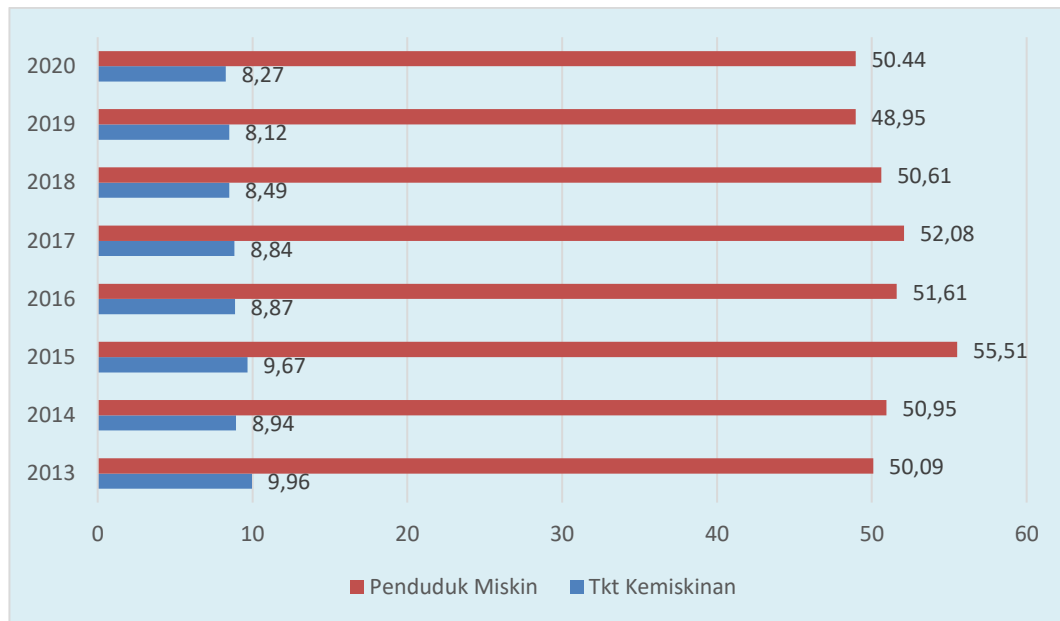
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.8.
Data Kemiskinan Kota Jambi 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	9,96	8,94	9,67	8,87	8,84	8,49	8,12	8,27
Penduduk Miskin (orang)	50.090	50.950	55.510	51.610	52.080	50.610	48.950	50.440
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	346.099	359.686	372.600	397.088	413.722	466.854	488.034	529.090
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,23	0,98	1,36	1,59	1,13	1,26	1,52	1,47
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,20	0,25	0,43	0,27	0,28	0,42	Db

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,27 % pada Tahun 2020. Dengan tingkat kemiskinan 8,27% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2013 tingkat kemiskinan berada pada 9,96%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.10.
Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2013-2020

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada Tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada Tahun yang dijadikan Tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing lapangan usaha (kategorial) maupun dari sisi penggunaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp.16.583,95 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp. 29.815,12 milyar pada Tahun 2020. Begitu pula dengan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2013 meningkat dari Rp. 13.939,74 milyar menjadi Rp. 29.815,12 milyar pada Tahun 2020. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10. dan tabel 2.11.

Tabel 2.9.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	222,96	259,50	285,98	310,93	318,35	342,17	341,08	344,91
B Pertambangan dan Penggalian	934,93	945,87	541,71	519,83	407,74	579,55	548,01	368,32
C Industri Pengolahan	1.988,89	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.981,19	3.112,50	3.195,60
D Pengadaan Listrik dan Gas	24,08	30,78	38,21	47,92	55,56	61,40	67,04	69,02
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,19	51,11	56,36	62,06	66,78	71,41	83,91	81,73
F Konstruksi	1.685,21	1.830,53	1.929,78	2.090,38	2.308,87	2.554,04	2.801,84	2.796,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23	8.877,83	9.549,01	9.496,73
H Transportasi dan Pergudangan	1.963,93	2.162,10	2.535,82	3.072,60	3.329,32	3.549,56	3.685,95	2.588,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	357,05	439,12	484,23	558,39	631,99	682,67	735,07	683,77
J Informasi dan Komunikasi	721,77	788,72	941,74	1.115,13	1.205,59	1.333,28	1.436,66	1.559,39
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.090,06	1.179,77	1.251,24	1.465,86	1.536,12	1.596,56	1.678,38	1.815,00
L Real Estate	437,89	480,60	527,00	586,66	634,74	715,29	785,76	792,09
M,N Jasa Perusahaan	497,99	554,29	633,41	729,19	792,13	860,37	922,46	894,50
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.208,89	1.597,56	2.021,31	2.152,99	2.263,90	2.503,89	2.632,52	2.696,63
P Jasa Pendidikan	813,56	830,90	956,33	1.091,38	1.190,86	1.289,00	1.398,84	1.458,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346,36	419,77	473,04	544,57	587,99	635,72	703,37	767.502,8
R,S, T,U Jasa Lainnya	122,20	130,62	150,39	169,12	181,46	199,92	210,60	206.542,5
PDRB	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Tabel 2.10.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167,00	176,10	180,64	183,86	187,68	342,17	341,08	344,91
B Pertambangan dan Penggalian	760,24	766,19	526,09	509,00	418,28	579,55	548,01	368.315,5
C Industri Pengolahan	1.751,32	1.866,51	1.962,94	2.045,89	2.124,29	2.981,20	3.112,50	3.195,60
D Pengadaan Listrik dan Gas	23,52	27,64	29,45	31,18	31,73	61,40	67,04	69.018,1

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,82	40,08	41,27	42,99	43,96	71,41	83,91	81.727,6
F Konstruksi	1.421,24	1.479,15	1.516,11	1.578,66	1.703,57	2.554,04	2.801,84	2.796,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.318,51	3.763,51	4.219,92	4.544,46	4.784,48	8.877,83	9.549,01	9.496,73
H Transportasi dan Pergudangan	1.744,40	1.887,58	1.995,12	2.242,84	2.398,29	3.549,56	3.685,95	2.588,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280,18	336,43	350,23	379,07	415,17	682,67	735,07	683,77
J Informasi dan Komunikasi	683,71	709,84	776,30	843,49	900,36	1.333,28	1.436,66	1.559,39
K Jasa Keuangan dan Asuransi	889,81	919,66	936,67	1.050,08	1.085,94	1.596,56	1.678,38	1.815,00
L Real Estate	377,29	392,46	402,01	421,73	444,99	715,29	785,76	792,09
M,N Jasa Perusahaan	394,13	418,40	446,93	476,18	504,52	860,37	922.463,7	894,50
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	996,42	1.142,18	1.215,55	1.251,81	1.282,75	2.503,89	2.632,52	2.696,63
P Jasa Pendidikan	665,36	674,12	725,60	771,53	805,60	1.289,00	1.398,84	1.458,20
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	315,47	364,42	401,89	430,57	457,50	635,72	703,37	767,50
R,S,T ,U Jasa Lainnya	112,32	115,97	125,23	133,10	139,24	199,92	210,60	206,54
PDRB	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	28.797,41	30.636,17	29.815,12

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Berdasarkan Tabel 2.10 dan 2.11 terlihat bahwa secara agregat seluruh lapangan usaha atau kategori pembentuk perekonomian regional Kota Jambi mengalami peningkatan, kecuali kategori usaha pertambangan dan penggalian (sekunder). Kondisi ini menggambarkan tren peningkatan total output barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Jambi dibandingkan Tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB sejalan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja (Tabel 2.55), sedangkan peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja, membuktikan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tersedia, sehingga secara makro perekonomian Kota Jambi tumbuh secara berkualitas.

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam membentuk struktur ekonomi

suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang dominan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.11.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,37	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11	1,16
B Pertambangan dan Penggalian	5,64	4,98	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78	1,24
C Industri Pengolahan	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09	10,72
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
F Konstruksi	10,16	9,65	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08	9,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48	31,85
H Transportasi dan Pergudangan	11,84	11,39	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02	8,68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38	2,29
J Informasi dan Komunikasi	4,35	4,16	4,42	4,57	4,58	4,62	4,66	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,57	6,22	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34	6,09
L Real Estate	2,64	2,53	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55	2,66
M,N Jasa Perusahaan						2,98	3,02	3,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,29	8,42	9,49	4,47	4,53	8,68	8,53	9,04
P Jasa Pendidikan	4,91	4,38	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53	4,89
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,21	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28	2,57
R,S, T,U Jasa Lainnya	0,74	0,69	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

* Angka Sementara

**Angka Perbaikan

Dari tabel 2.11, selama Tahun 2013-2020 kategori yang paling besar kontribusinya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,85%, Industri Pengolahan sebesar 10,72%, konstruksi sebesar 9,38%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya

bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Propinsi Jambi dan sekitarnya.

5. Pertumbuhan Ekonomi

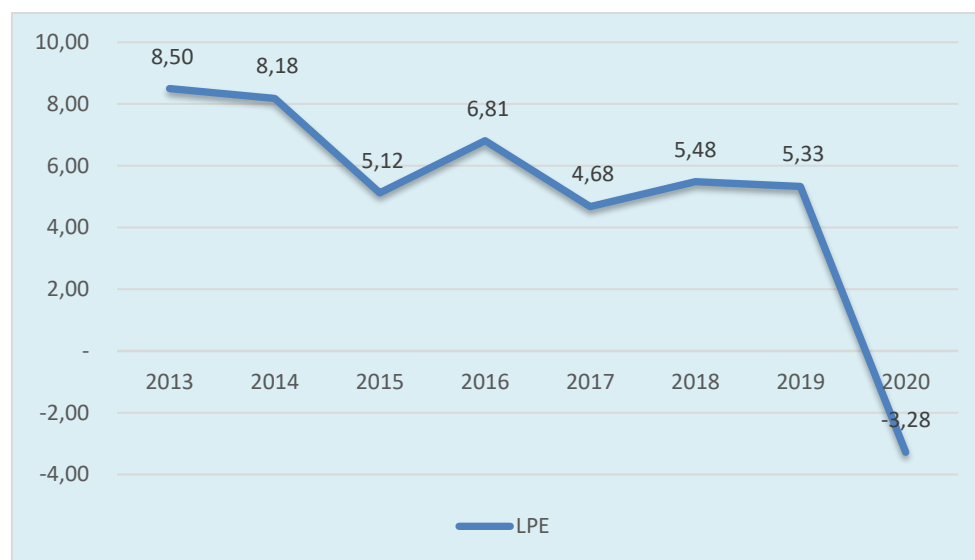
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang Tahun 2013-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,50%.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I 2020, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas dan kembali pada lintasan meningkat dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi dan juga kota perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,60 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

sebesar 6,59 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,58 persen; Jasa Lainnya sebesar 3,48 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,23 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah, bekerja serta mobilitas yang mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi di Kota Jambi, seperti sektor transportasi terutama angkutan udara, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restoran, pariwisata.

Namun secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu 8 Tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021 (data diolah)

Gambar 2.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2012-2020

6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan

nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.12.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No .	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34	16.415,75	17.584,80	17.679,42
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12.061,84	12.020,30
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64	56,88	57,08	59,30
2.	Atas Dasar Harga Konstan	65,44	63,65	63,54	62,16	62,45	62,51	61,66	63,54

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada

Tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.287,97 miliar rupiah dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6.463,41. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing Tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.13.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.287,97	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.274,12	6.165,09	6.626,44	6.463,41
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.357,06	3.411,11	3.424,91	3.311,91	3.399,45	3.915,40	4.210,23	4.038,76
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	25,86	24,78	23,49	21,12	20,06	21,36	21,48	21,68
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,08	22,62	21,61	19,55	19,18	20,97	21,52	21,35

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.677,71 milyar pada Tahun 2013 menjadi Rp.4,6378 milyar pada Tahun 2017. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.14.

Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pembentukan Modal Tetap Bruto									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.677,71	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44	6.292,62	6.855,91	6.862,88
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.006,63	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.678,80	4.383,19	4.797,22	4.781,20
Persentase PMTB thd PDRB (persen)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28,21	26,31	24,06	22,99	23,76	21,80	22,22	23,02
2.	Atas Dasar Harga Konstan	28,74	26,75	25,33	24,94	26,39	24,23	24,52	25,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku Tahun 2013 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,13 juta rupiah naik menjadi 49,18 juta rupiah pada Tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2013 sebesar Rp. 24,48 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 31,21 juta rupiah pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.15.

Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (miliar rupiah)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.797,41	30.636,17	29.815,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.667,87	19.561,13	18.918,89
PDRB per Kapita (ribu rupiah)									
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	29.128,83	33.407,46	39.963,50	41.827,03	44.481,13	48.369	51.024	49.183
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.484,41	26.546,80	27.517,55	29.026,25	29.990,39	31.201	32.503	31.208
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)									
	Atas Dasar Harga Konstan	6,21	8,42	3,66	6,48	4,68	5,30	4,79	-3,28

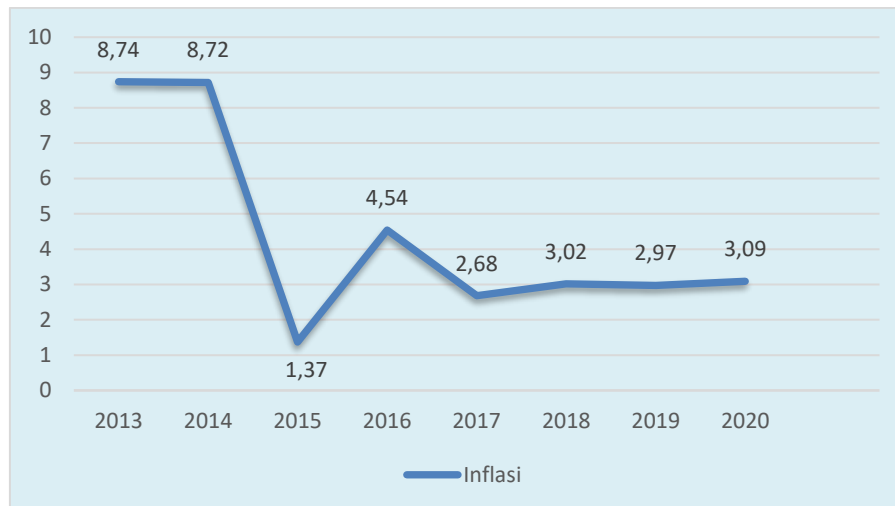
Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

8. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju inflasi Kota Jambi selama 8 Tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada Tahun 2013 dan 2014. Pada Tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Pada tahun 2020 inflasi mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi Covid yang melanda dunia dan Indonesia Pada Tahun 2020, inflasi Kota Jambi sebesar 3,09%. Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen

Laju inflasi dalam kurun waktu 8 Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

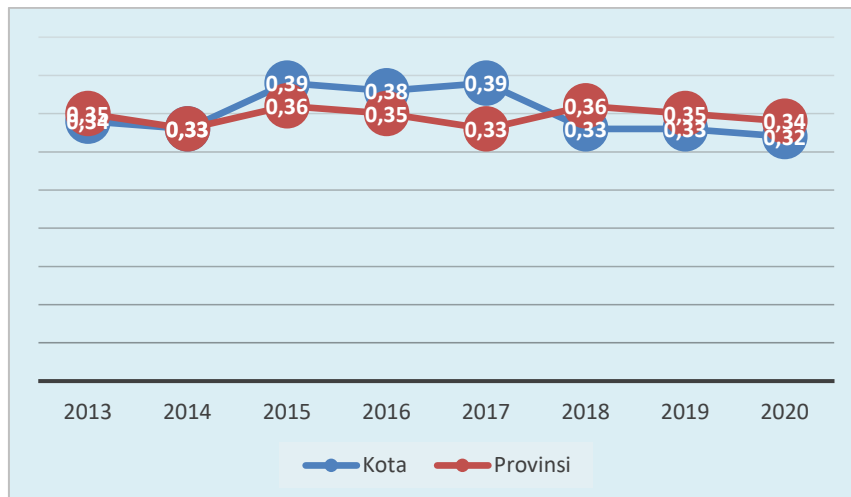
Gambar 2.12.

Nilai Inflasi rata-rata di Kota Jambi Tahun 2013-2020

9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2020 mencapai 0,32 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,34. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi telah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.13.

Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2020

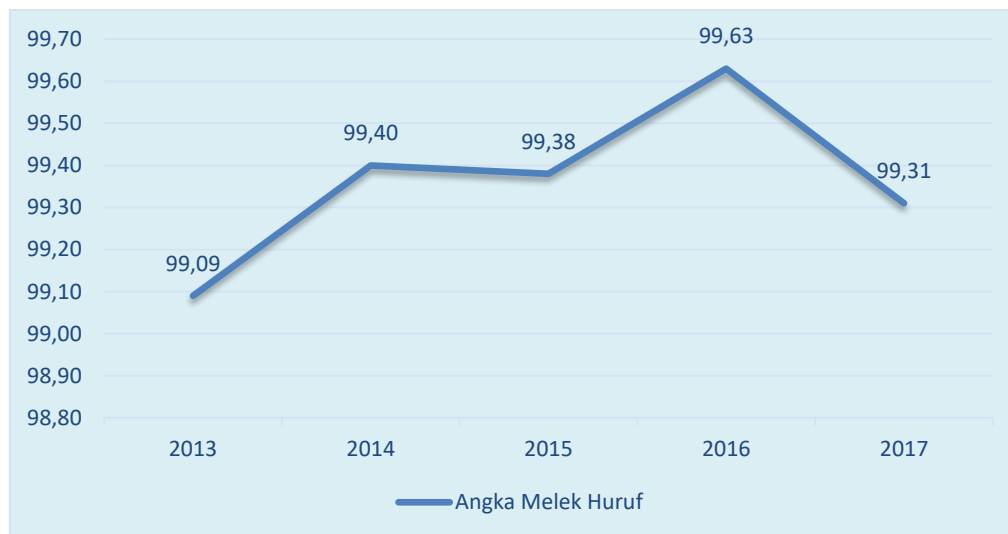
2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

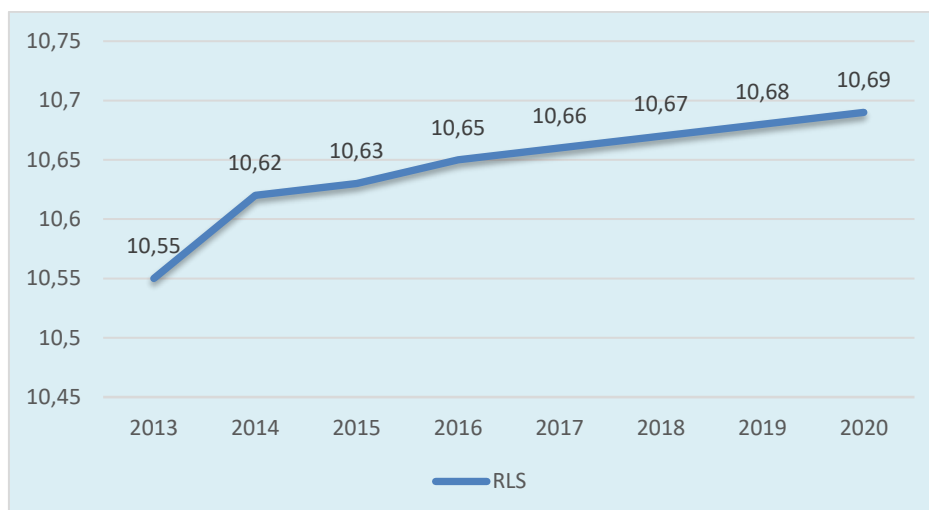
Gambar 2.14.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 Tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 Tahun sudah sangat baik tinggal 0.01 yang menjadi PR kita.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,55 Tahun 2013 menjadi 10,92 pada Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan delapan tahun yang lalu. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



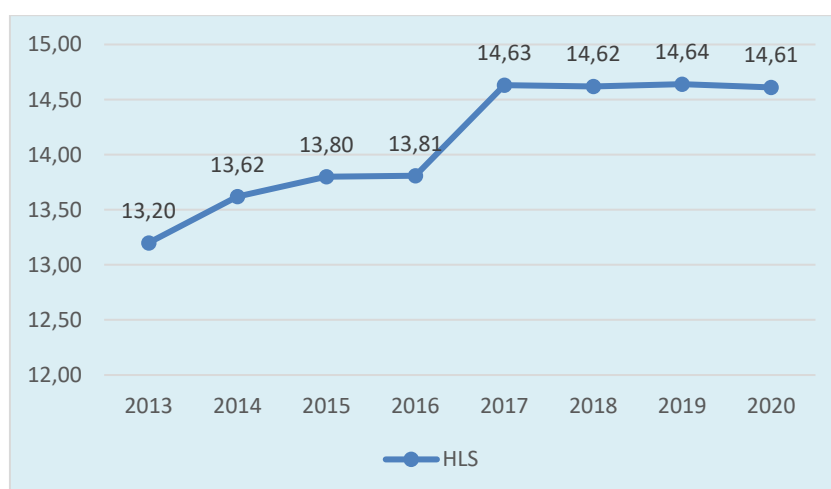
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.15.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang biasa digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan dan deskripsi harapan peningkatan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. Tren positif HLS Kota Jambi dari 13,20 poin menjadi 15,10 poin pada Tahun 2020 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.16.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

4. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan
SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64.398	70.520	71.011	71.197	73.485	73.521	57.383	59.616
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097	57.799
3	APK SD/MI, Paket A	102,23	108,84	108,87	108,88	110,95	111,00	101,00	103,14
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24.634	24.634	34.894	35.962	34.985	34.992	26.900	29.817
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	22.633	31.614	32.574	31.236	31.236	30.754	30.737
3	APK SMP/MTS, Paket B	108,84	108,84	110,38	110,40	112,00	112,02	112,04	97,01
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28.955	28.955	35.015	33.710	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	32.201	38.532	35.984	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	89,92	89,92	90,87	93,68	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan tingkat SMP. APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari Tahun 2013 sampai 2020 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 102,23% meningkat di Tahun 2020 menjadi 103,14%. Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat, di tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 108,84% namun menurun di tahun 2020 menjadi 97,01%.

Pada tingkat SMA, APK tingkat SMA belum mencapai 100%, tertinggi baru mencapai 93,68% di Tahun 2016. Namun angka capaiannya mengalami kenaikan setiap Tahunnya. Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada Tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada Tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.

Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308	10.485
2.	Jumlah Siswa SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308	11.308	10.485
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Tabel 2.18.

Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380	11.235	11.425
2.	Jumlah Siswa SMP/MTS	7.465	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380	11.235	11.425
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS masih terbilang tinggi. Selain itu jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

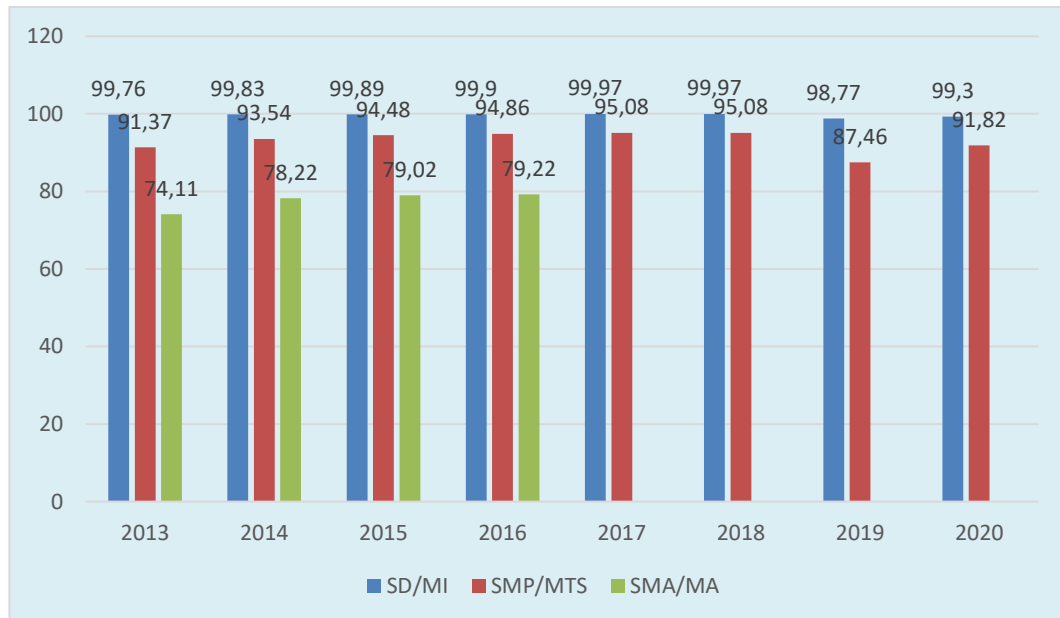
Tabel 2.19.
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan
SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	60.847	64.684	65.154	65.325	66.212	66.212	57.383	58.211
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234	58.097	57.799
3	APM SD/MI, Paket A	99,76%	99,83%	99,89%	99,90%	99,97%	99,97%	98,77%	99,30%
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	20.679	29.573	30.775	29.989	29.698	26.698	26.900	28.225
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	31.614	32.574	31.614	31.236	31.236	30.754	30.737
3	APM SMP/MTS, Paket B	91,37%	93,54%	94,48%	94,86%	95,08%	95,08%	87,46%	91,82%
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	23.865	30.140	28.436	28.162	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	38.532	35.984	36.550	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	74,11%	78,22%	79,02%	79,22%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang meningkat setiap Tahunnya di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada Tahun 2013-2020 hampir seluruh anak usia

sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,30%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai cukup tinggi di kisaran 91,82%. Sementara itu untuk capaian angka APM di tingkat SMA/MA/SMK, masih dapat dikatakan cukup tinggi dengan angka yang berkisar antara 74,11 sampai 79,22%. Ini bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.17.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.2.2.2. Kesehatan

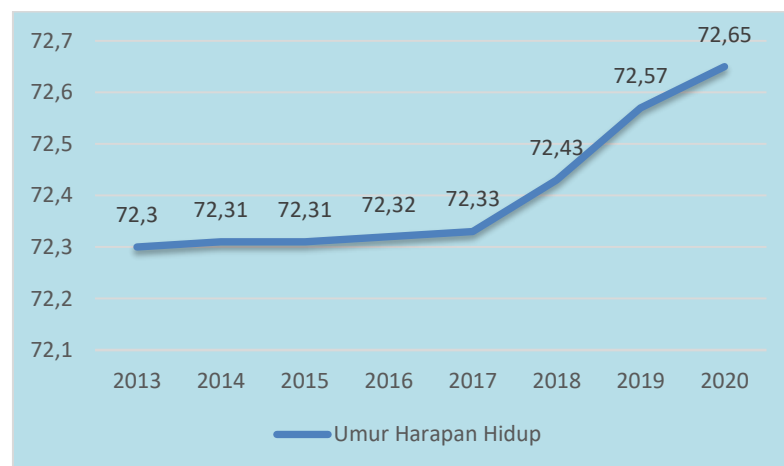
Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2013 – 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20.
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup	72,30	72,31	72,31	72,32	72,33	72,43	72,57	72,65
2	Angka Kematian Ibu	4	9	7	3	4	2	5	3
3	Angka Kematian Bayi	27	9	9	9	12	7	7	7
4	Jumlah Kelahiran Hidup	13.592	13.079	12.745	10.430	13.039	10.205	10.104	10.489

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya umur harapan hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

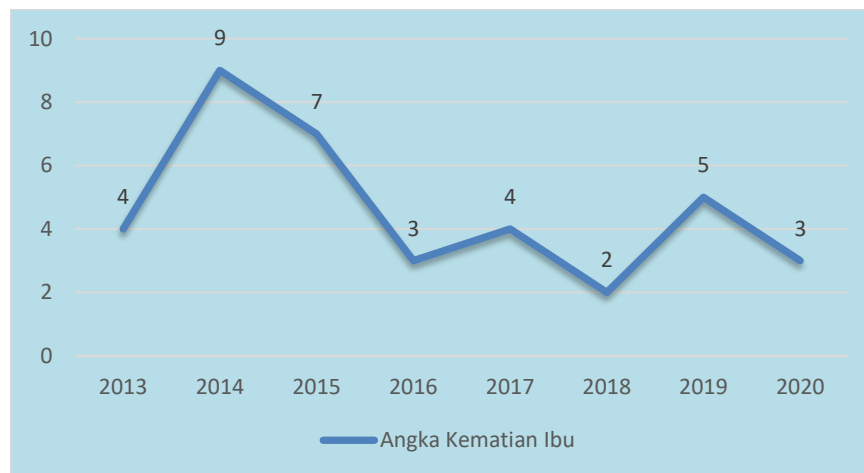
Gambar 2.18
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi
Tahun 2013-2020 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2013-2020, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2013 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,30 meningkat menjadi 72,65 pada tahun 2020, Hal ini berarti bahwa dari

tahun 2013 sampai tahun 2020, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

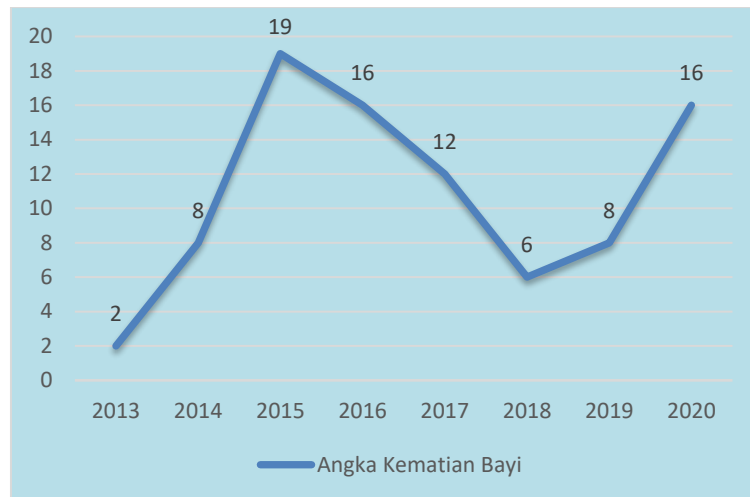
Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2013-2020 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9 dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kota Jambi mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2020 menjadi 3.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Jambi selama rentang tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi dengan AKB terendah pada tahun 2013, sebesar 2 jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 19 jiwa. Setelah itu mengalami penurunan hingga tahun 2018, AKB Kota Jambi menunjukkan perkembangan negatif dengan meningkatnya AKB di Kota Jambi hingga tahun 2020, diantara 1.000 kelahiran hidup ada 16 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Dengan meningkatnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya penurunan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2013-2015 dan 2018-2020

Indikasi peningkatan angka kematian berbanding terbalik dengan penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka stunting (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk semakin menurun dari 0.03% Tahun 2013 turun

menjadi 0.01 Tahun 2020. Sedangkan Angka Stunting mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 17,4 di tahun 2020.

Tabel 2.21.

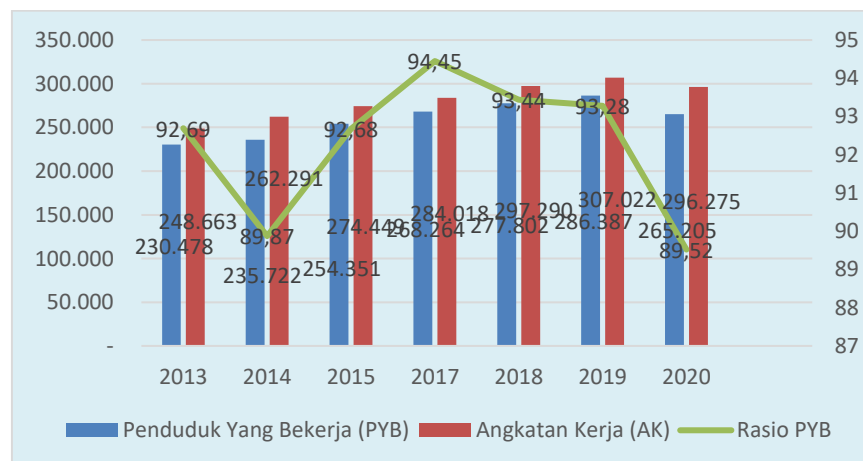
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	18	10	11	5	6	4	4	4
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853	34.919
3	Rasio PBGB (%)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0,01	0,01
4	Angka Stunting	dta	dta	dta	dta	dta	26,2	18,62	17,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja sebagai hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja (PYB) di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun cukup berarti dari 92,69% menjadi 89,92%. Secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.18.

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.22.

Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2021

Sementara itu aktivitas kesehatan masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2020, jumlah klub olahraga mengalami penambahan dari hanya 28 cabang olahraga menjadi 32 cabang olahraga, dengan jumlah gedung hanya 2 unit, artinya ketersediaan gedung olahraga masih kurang di Kota Jambi.

Tabel 2.23.

Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Cabang Olahraga (unit)	28	28	28	28	28	30	32	32
Jumlah Gedung Olahraga (unit)	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

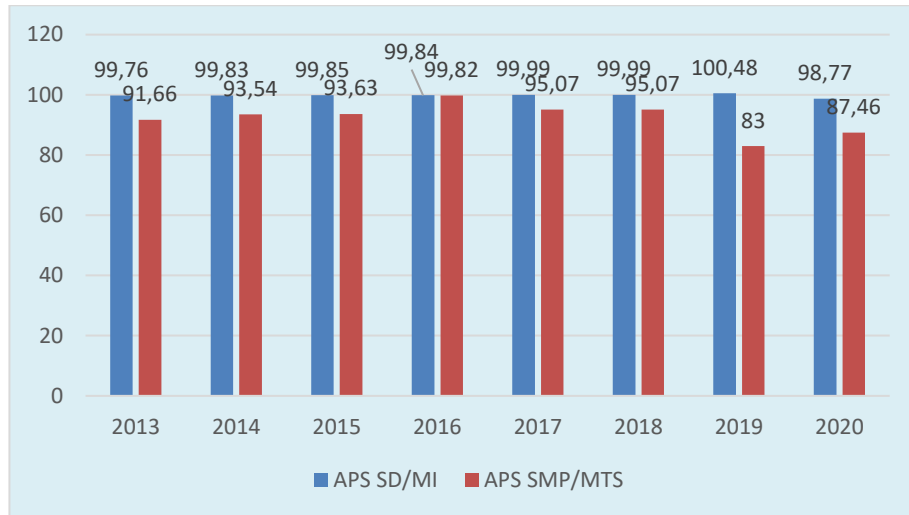
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 Tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12); usia SMP (13-15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada Tahun 2020 untuk usia SD/MI sebesar 98,77%, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah sebesar 98,77 persen, sisanya 1,23% ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara

itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 97,46%. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari Tahun 2013-2020 relatif mengalami kenaikan. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi semakin tinggi.



Gambar 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK di Kota Jambi Tahun 2013-2020

APS pada tingkatan SMP/MTs cenderung lebih rendah dibandingkan SD/MI kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah ataupun bekerja setelah tamat SD/MI.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI								
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	62.847	64.684	67.552	62.444	66.212	66.212	61.106	57.383
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	66.234	58.300	58.097
1.3.	APS SD/MI	99,76	99,83	99,85	99,84	99,99	99,99	100,48	98,77
2	SMP/MTs								
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	28.369	29.573	30.357	27.918	29.698	29.698	26.651	26.900
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32..420	27.968	31.236	31.236	30.795	30.754
2.3.	APS SMP/MTs	91,66	93,54	93,63	99,82	95,07	95,07	83,00	87,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

2. Ketersediaan Sekolah

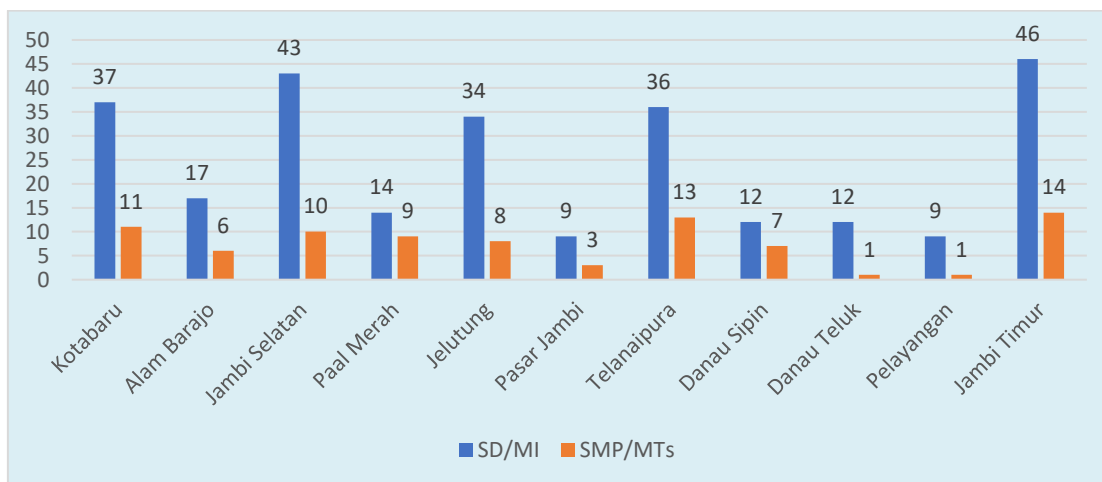
Tabel 2.31. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2013-2020. Secara umum, sampai dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.25.
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. SD/MI									
1.1.	Jumlah Sekolah	247	256	258	263	263	2.602	2.625	2.632
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	58.300	58.097	57.799
1.3.	Rasio	39.21	39.51	38.13	42.05	39.70	0,044	0,045	0,045
2. SMP/MTS									
2.1.	Jumlah sekolah	97	96	96	103	107	1.131	1.135	1.236
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236	30.795	26.900	30.737
2.3.	Rasio	31.34	30.36	29.61	36.82	34.25	0,037	0.042	0.040

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada grafik di bawah, untuk tingkat SD dan SMP sebaran sekolah antar kecamatan cukup merata dimana jumlah sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur. Baik SD/MI maupun SMP/MTS. Persebaran ini belum menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid.

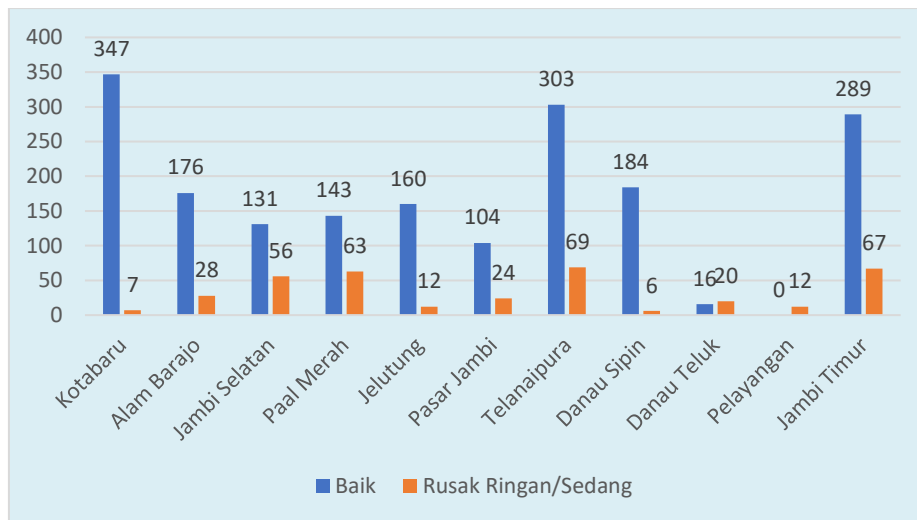


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.20.

Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTS menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020

Adapun kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi berdasarkan tingkat kerusakan setiap kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

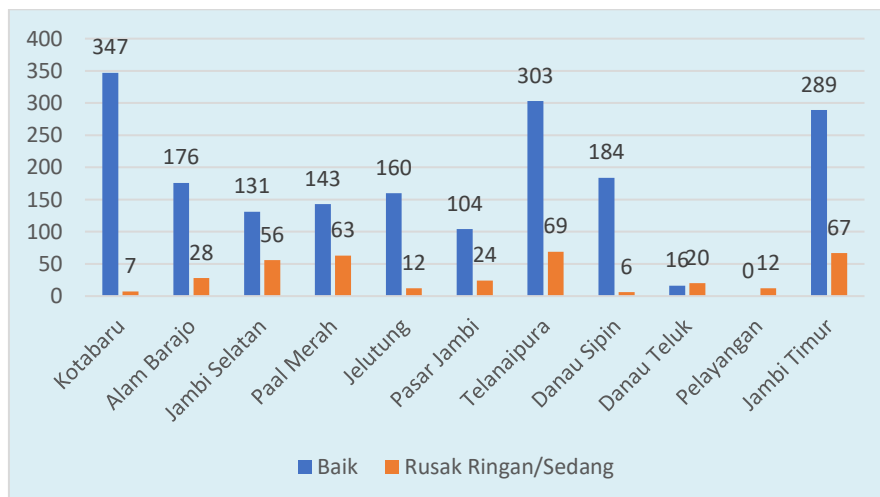


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.21.

Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2020

Banyaknya ruang kelas SD/MI yang rusak ringan sampai rusak berat membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah agar kualitas pendidikan dasar dan menengah lebih baik pada masa yang akan datang. Kebijakan yang sama juga dibutuhkan pada sekolah tingkat SMP/MTS yang kondisinya hampir sama seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2020

Gambar 2.22.

Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2020

3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.26.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Tahun 2013-2020

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI								
1.1.	Jumlah Guru	3.267	3.561	3.477	3.354	3.607	3.206	3.184	3.232
1.2.	Jumlah Murid	65.732	69.870	69.958	69.973	66.212	62.336	60.976	59.616
1.3.	Rasio	0,049	0,050	0,049	0,047	0,054	0,051	0,052	0,067
2	SMP/MTs								
2.1.	Jumlah Guru	2.228	2.269	2.295	2.273	1.777	1.557	1.558	1.621
2.2.	Jumlah Murid	24.835	34.710	34.838	34.928	29.698	26.350	26.442	29.817
2.3.	Rasio	0,089	0,065	0,065	0,065	0,059	0,059	0,058	0,061

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan bahwa rasio kecukupan guru dan murid untuk tingkatan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi sudah sangat baik. Rasio SD/MI pada tahun 2020 sebesar 0,067 dan SMP/MTs sebesar 0,061 jauh lebih tinggi dibandingkan standar rasio ideal guru dan murid yakni 1:28. Gambaran jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan Tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	285	6.684	0,043	158	2.592	0,061
2	Kec. Danau Sipin	177	2.258	0,078	97	3.154	0,031
3	Kec. Danau Teluk	58	1.095	0,053	26	326	0,080
4	Kec. Jambi Selatan	485	9.815	0,049	153	2.388	0,064
5	Kec. Jambi Timur	442	8.284	0,053	238	4.574	0,052
6	Kec. Jelutung	415	6.311	0,066	144	2.083	0,069
7	Kec. Kota Baru	325	8.933	0,036	285	5.549	0,051
8	Kec. Paal Merah	102	4.727	0,022	156	2.232	0,070

9	Kec. Pasar Jambi	101	1.086	0,093	85	1.828	0,047
10	Kec. Pelayangan	141	1.099	0,128	45	74	0,608
11	Kec. Telanai Pura	701	9.327	0,075	235	5.072	0,046
Jumlah		3.232	59.616	0,697	158	2.592	0,061

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2019	2020
SD/MI/Paket A									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438	11.425
2	Jumlah Siswa SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308	11.438	11.425
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7,383	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235	11.425
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308	11.235	11.425
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C									
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	9,918	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	9,922	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2021

Angka kelulusan siswa SD/MI mencapai 100% sedangkan angka kelulusan SMP/MTS dari tahun 2014 mencapai 100 %. Angka kelulusan yang tinggi ini harus juga diiringi dengan kualitas lulusan. sehingga kebijakan pembangunan sektor pendidikan dasar dan menengah di Kota Jambi pada masa yang akan datang adalah optimalisasi sumber daya yang ada sehingga kualitas lulusan menjadi semakin berdaya saing di skala nasional dan global.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2017 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	453	459	460	460	460	460	460	467
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805	45.853	34.919
3	Rasio RPPB (%)	7,62	8,10	7,93	8,69	6,31	9,62	10,03	13,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Tabel 2.30.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	14	14	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio RSPP (%)	0,0031	0,0030	0,0024	0,0024	0,0029	0,0028	0,0028	0,0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Jambi selama 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.31.

Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	59	59	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Ketersediaan dokter di kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 252 orang menjadi 398 orang pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.32.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	252	258	255	255	259	326	868	398
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620	616.355	618.814
3	Rasio DPP (%)	0,045	0,045	0,044	0,043	0,043	0,053	0,014	0,064

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Pada tahun 2020, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit dan puskesmas pembantu 39 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 55 orang, dokter spesialis 55 orang, dokter gigi 26 orang, bidan 303 orang, dan perawat sebanyak 203 orang. Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan

dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

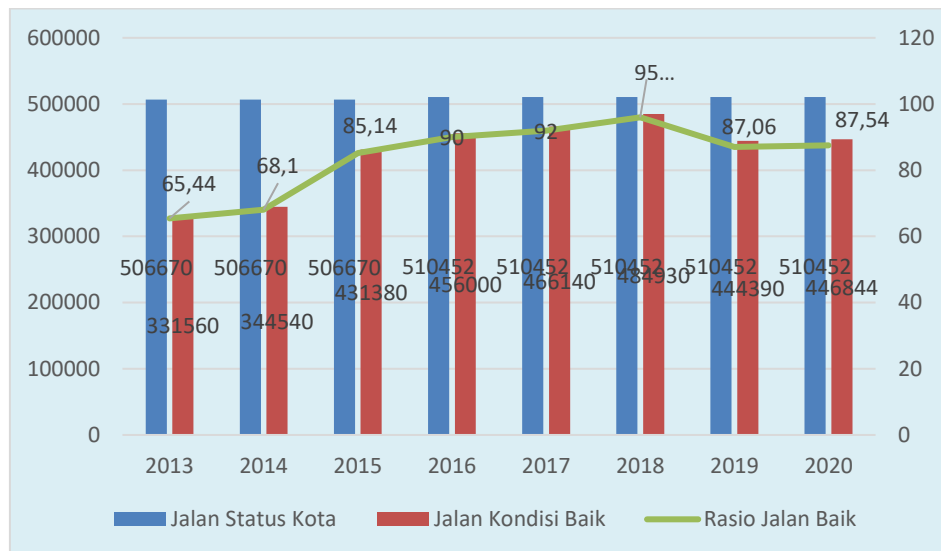
Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta

pengikat wilayah. Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2021

Gambar 2.23.

Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam delapan tahun terakhir rasio jaringan panjang jalan kondisi baik di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi. Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan

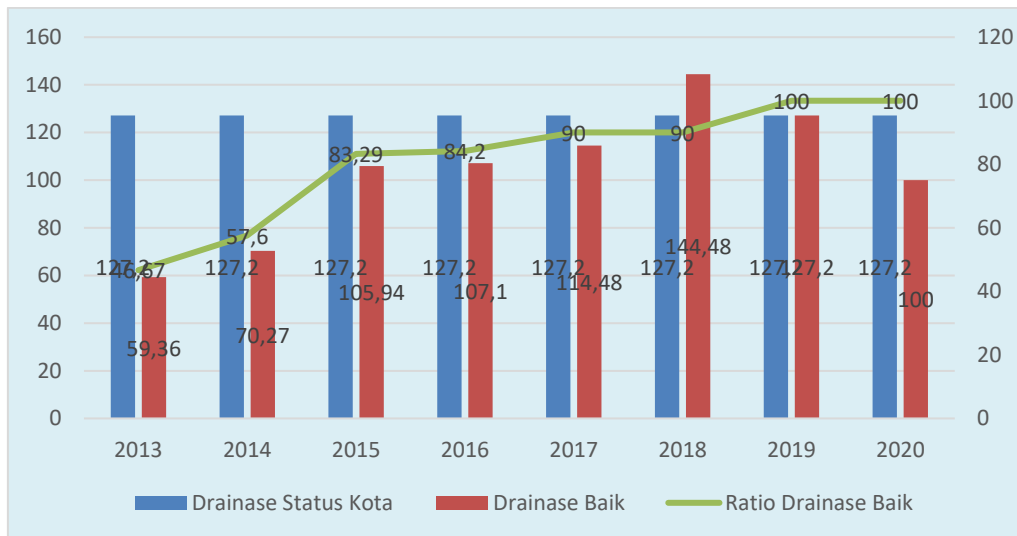
Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota

Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu \pm 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2021

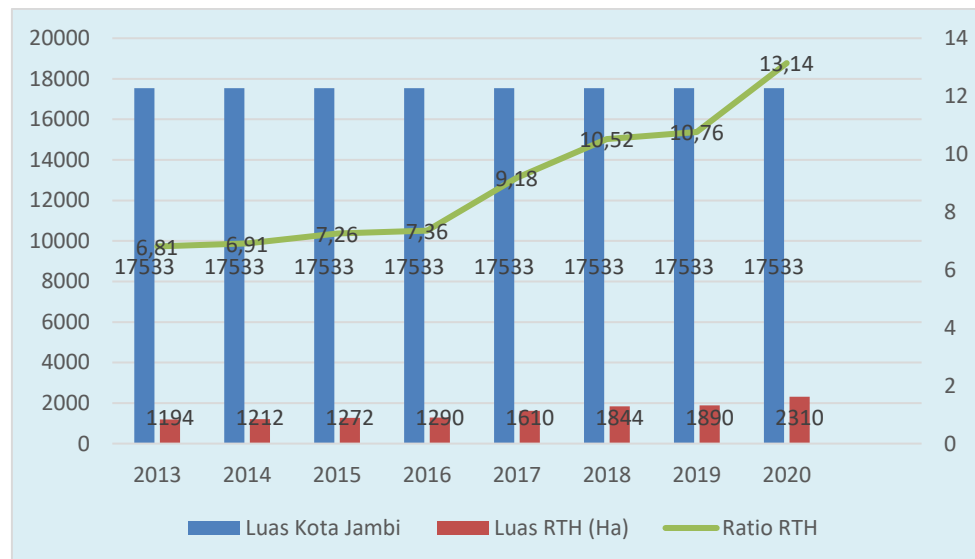
Gambar 2.24.
Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi tidak mengalami peningkatan dari sisi kuantitatif hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Jambi belum melakukan updating data drainase sehingga belum tercantum dalam SK Walikota Jambi.

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap Tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi

rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

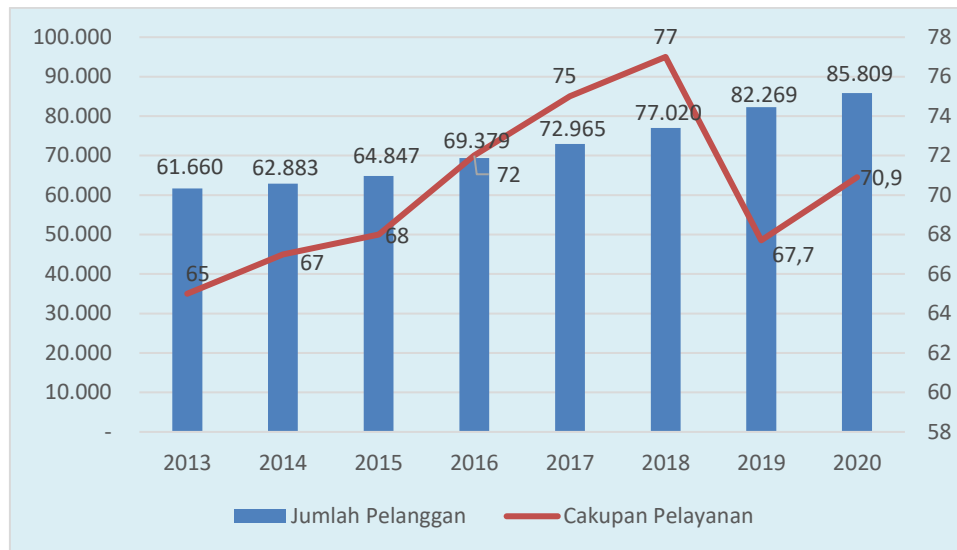


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLH Kota Jambi, 2021

Gambar 2.25.
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada gambar diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2013 sebesar 6,81% atau seluas 1.194 hektar. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “land banking” setiap Tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di Tahun 2020 telah mencapai 13,14% atau seluas 2.309,60 Ha. Penambahan luasan RTH ini secara signifikan didapatkan dari data ruang hijau aset Provinsi Jambi, vegetasi taman pada median dan bahu jalan (pedestrian), serta data luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data saat ini cakupan pelayanan sebesar 70,9 % yang artinya masih ada 29,1% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.



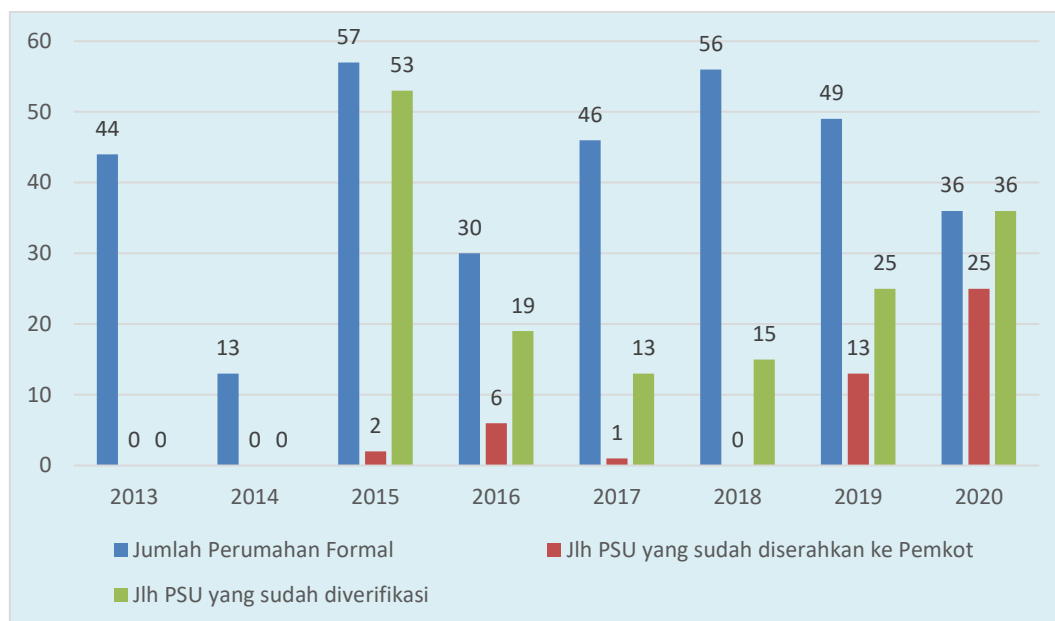
Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2021

Gambar 2.26.
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih
di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

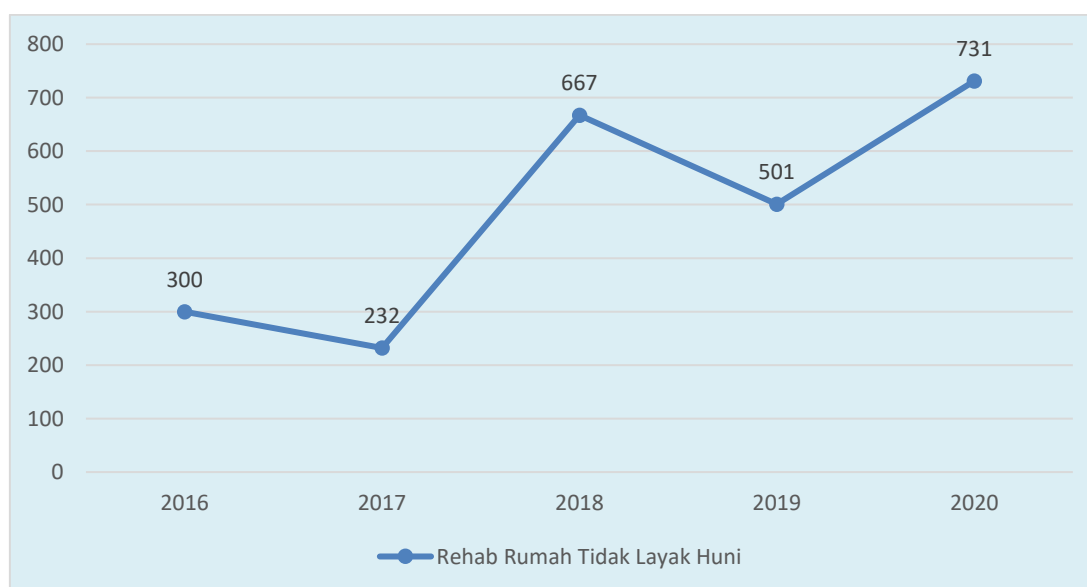
Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima Tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021`

Gambar 2.27.
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

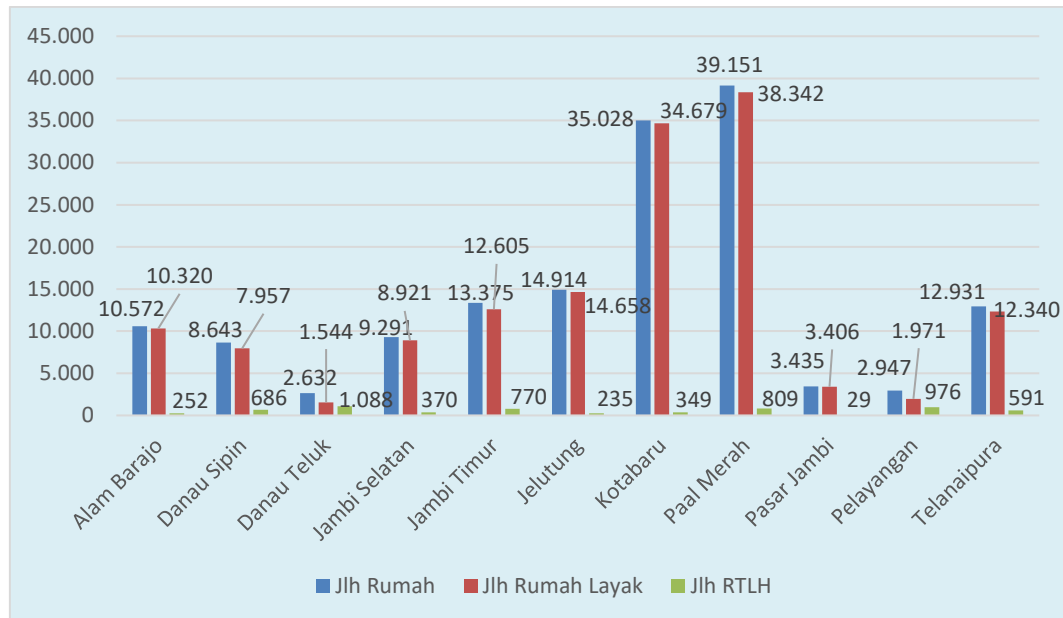
Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.28.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data yang disampaikan pada tahun 2020 jumlah RTLH sebanyak 6.155 unit atau hanya sekitar 4,03 % dibandingkan jumlah rumah yang ada di kota Jambi. RTLH terbanyak berada di kecamatan Danau Teluk sebesar 1.088 unit, sedangkan yang terendah di kecamatan Pasar Jambi sebesar 29 unit yang bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.29.

Data Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2020

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2020 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 188,97 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33.

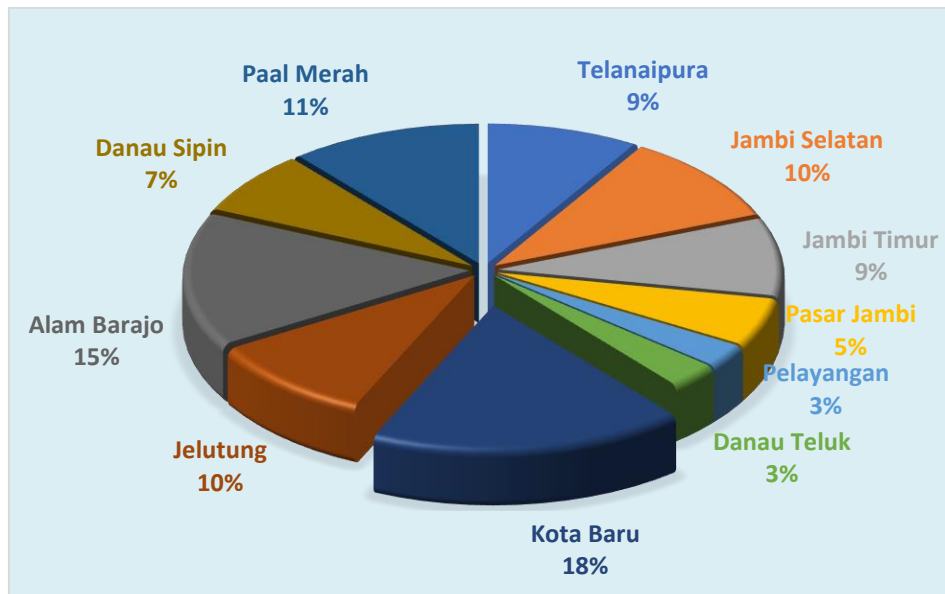
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih-Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,94
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	95,02
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincih	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	2,80
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0
TOTAL			986,57	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengan di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2021

Gambar 2.30.

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi Tahun 2020

Dari total sebanyak 18.793 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 150 watt sebanyak 1.690 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.559 titik, 40 Watt Sebanyak 623 Titik, 90 Watt Sebanyak 609 Titik, dan 180 Watt Sebanyak 58 Titik. Untuk jumlah pemukiman umum yang ada di Kota Jambi yang juga merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2020 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 926.368 M2.

2.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2020, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2020 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3 (tiga).

Tabel 2.34.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2020

Uraian	Tahun 2020	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	350 orang 606.200 jiwa	0.06
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35.

Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggaran Perda	Tad	tad	20	24	tad	20	25	31
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Tad	tad	20	24	tad	20	25	31
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	Tad	tad	100	100	tad	100	100	100
Jumlah Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad	621	579	109
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad	621	579	109
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	tad	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2021

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

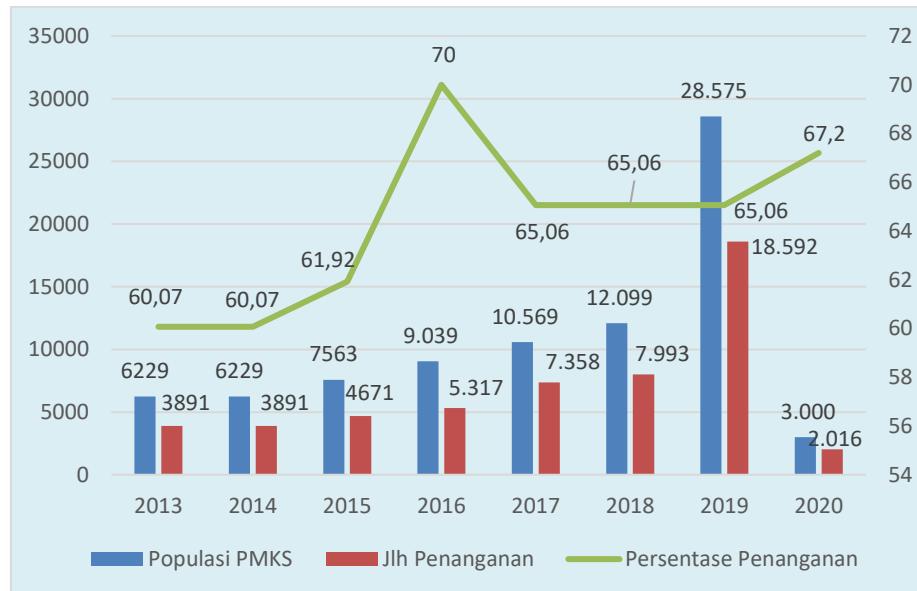
2.3.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada Tahun 2020 sebanyak 2.824 orang lansia potensial dan 1.852 lansia miskin, untuk tahun 2020 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 185 orang mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 2.016 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 28.575 orang pada tahun 2019 namun menurun lagi di tahun 2020 menjadi 3.000 orang, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 60% dari Tahun 2013 hingga 2020. Kenaikan terjadi pada

Tahun 2016 dan 2017 yang mencapai 70%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.



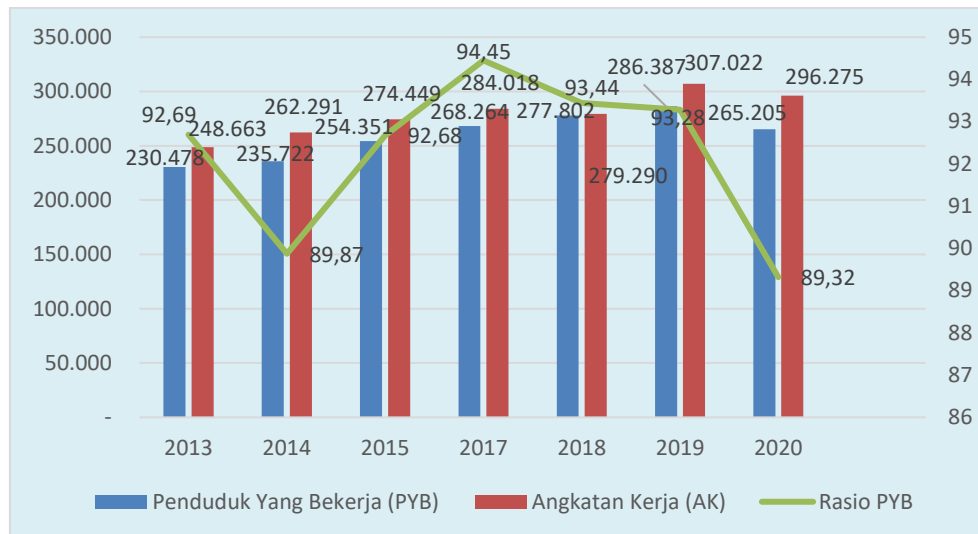
Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2021

Gambar 2.31.
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2013-2016 dan pada Tahun 2017 seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut.



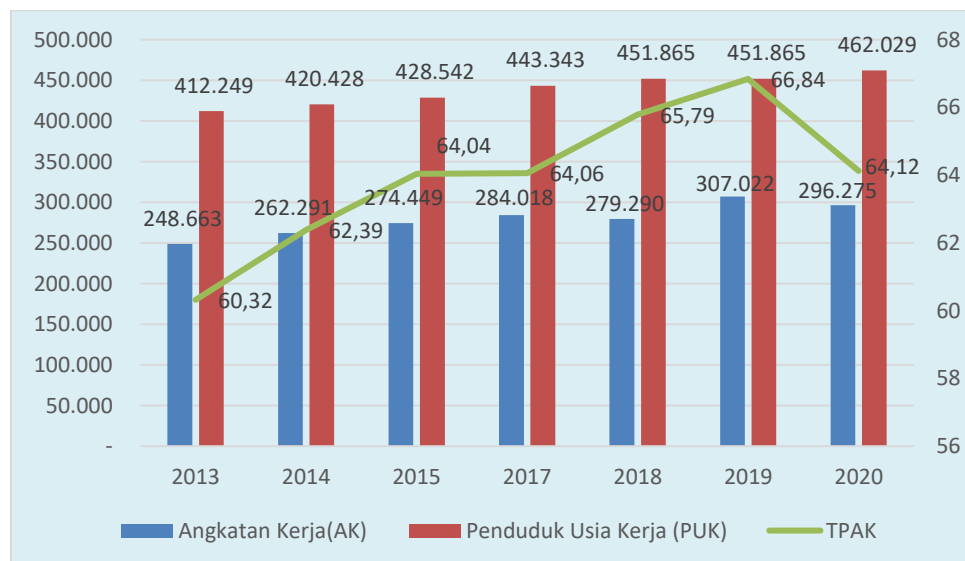
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2020

* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.32.

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

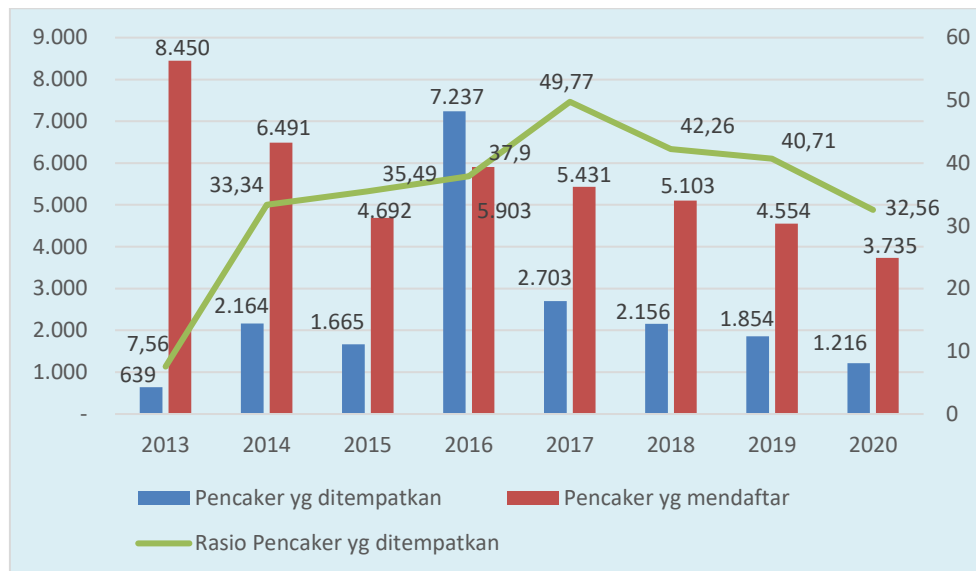
* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.33.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk

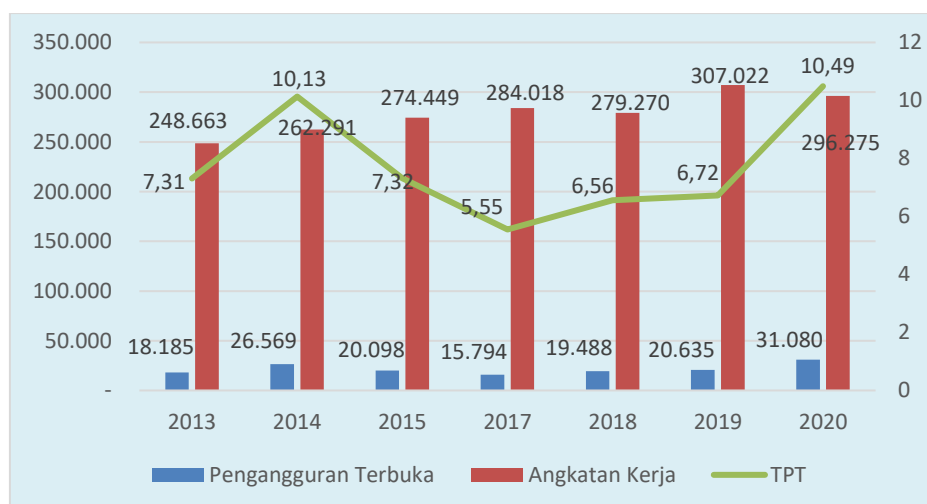
memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada Tahun 2020 di kota Jambi sebesar 64,12% artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

Gambar 2.34.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2020

Dari data tersebut di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan berfluktuasi dari Tahun ke Tahun, Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sedikit. Karena hal ini terjadi peningkatan angka pengangguran di Kota Jambi. Kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada gambar berikut :



Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2021

* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Gambar 2.35.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2013-2020

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada Tahun 2020 sekitar 10,49 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 Tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 10 orang merupakan pengangguran.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi Tahun 2013 – 2020 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan kota Jambi dan bertambahnya jumlah pegawai negeri perempuan di Kota Jambi yang pensiun, hal ini terlihat pada gambar berikut :



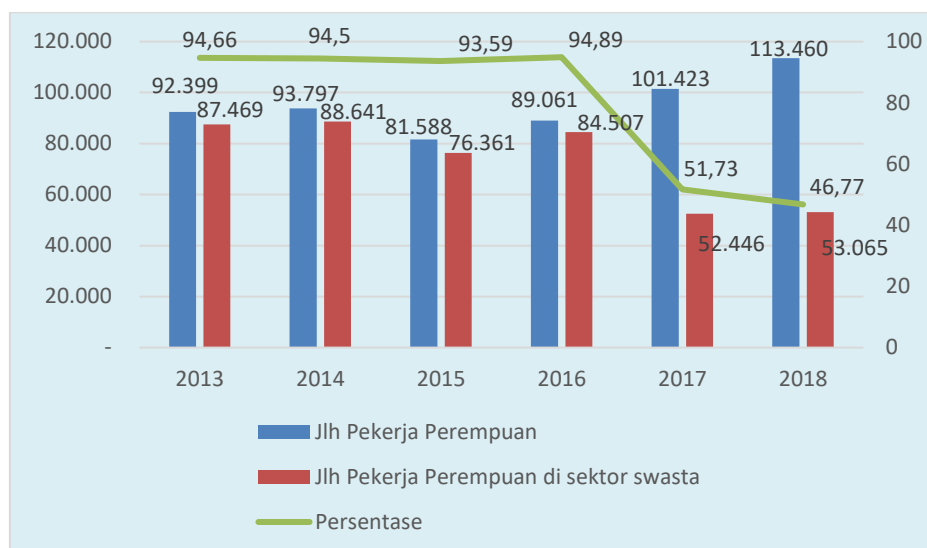
Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2021

Gambar 2.36.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat juga pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu delapan tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

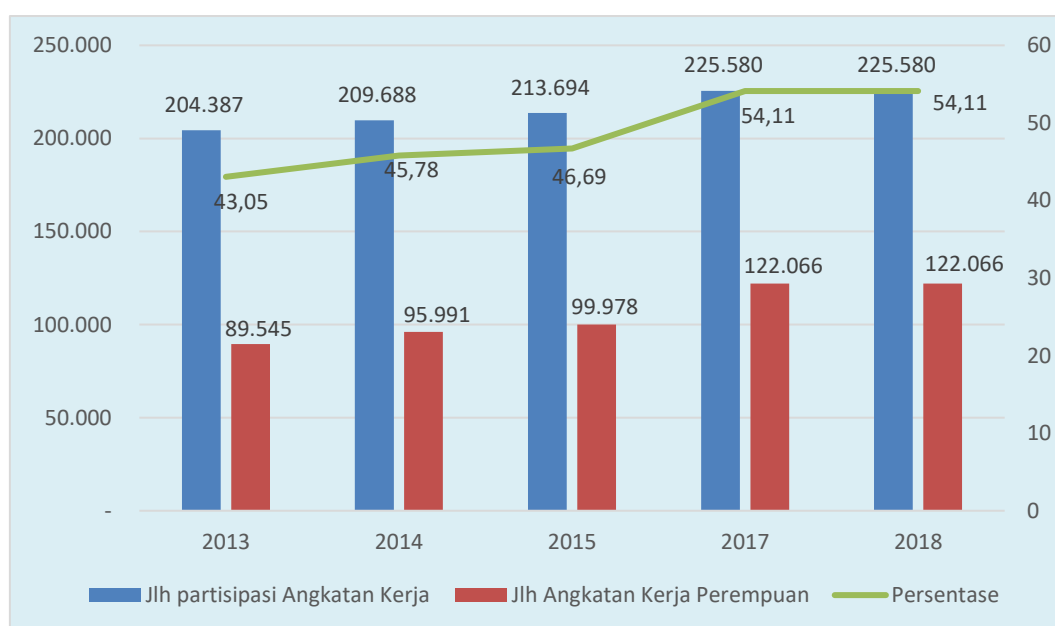


Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2021

Gambar 2.37.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) Tahun 2013-2020, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan dari 43,05% menjadi 46,69% atau 45,17% setiap Tahunnya.



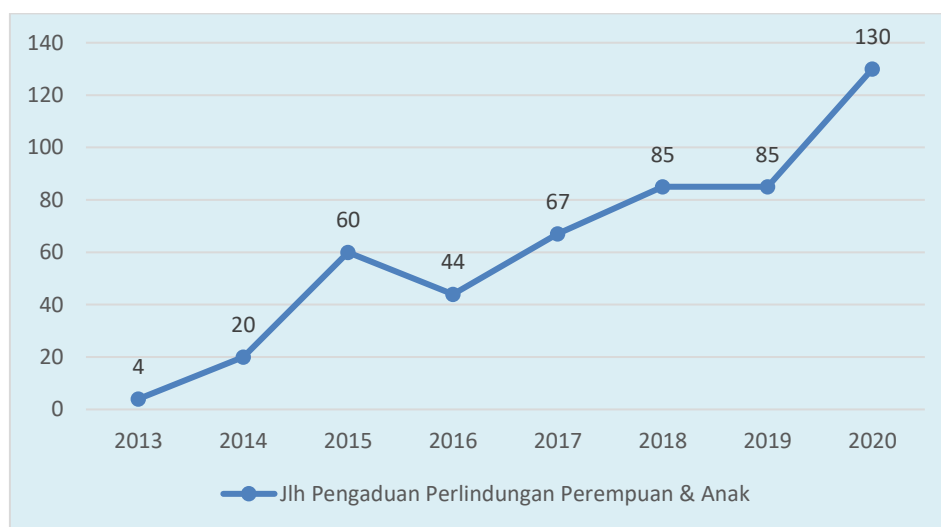
Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Sumber: BPS Prov. Jambi, 2021

Gambar 2.38.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor privat maupun sektor publik menunjukkan level partisipasi yang cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan program yang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja perempuan agar dapat menopang ekonomi keluarga secara mandiri, namun tetap mampu mengelola rumah tangga secara baik untuk masa depan keluarga dan anak-anak.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2021

Gambar 2.39.

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada Tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada tahun 2015 mencapai 60 kasus, pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 16 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari Tahun 2013-2016 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (tahun 2013), 20 kasus (tahun 2014), 60 kasus (tahun 2015) dan pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

2.3.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari Tahun ke Tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain: beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi Tahun 2020 adalah dari

segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.198 kkal/kap/hari (101,7% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 300,5 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 218,9 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 24,7 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supplay diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.37.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2020

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.141,3	51,9	53,1	0,5	26,0	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	97,6	4,4	4,5	0,5	2,2	2,3	2,5	2,3
Pangan Hewani	35,0	300,5	13,7	14,0	2,0	27,3	28,0	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	24,7	218,9	10,0	10,2	0,5	5,0	5,1	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	82,2	27,9	1,3	1,3	0,5	0,6	0,6	1,0	0,6
Kacang-kacangan	21	73,2	3,3	3,4	2,0	6,7	6,8	10,0	6,8
Gula	30,9	107,3	4,9	5,0	0,5	2,4	2,5	2,5	2,5
Sayur dan Buah	317,3	108,7	4,9	5,1	5,0	24,7	25,3	30,0	25,3
Lain-lain	42,4	122,6	5,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2021

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2020, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 91,50 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,6, berarti kurangnya konsumsi Buah/Biji berminyak.

2.3.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih dilakukan oleh BPN. Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015

tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.38.

Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	595	606	608	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	291	293	295	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	49	48	49	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan DPKAD Kota Jambi, 2021

Selain itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari Tahun 2013 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.39.

Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hak Milik	7.755	6.304	6.008	5.743	8.927	1.401	2.365	2.180
2.	Hak Guna Bangunan	1.296	540	906	890	1.817	341	720	1.560
3.	Hak Pakai	16	17	24	35	26	4	4	51
4.	Hipotek	5.532	5.526	5.198	4.929	4.037			

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, 2021

Perbandingan jumlah sertifikat dengan jumlah bangunan bisa menjadi tolok ukur kinerja dalam pembangunan di sektor kepemilikan properti penduduk Kota Jambi dari 3.791 unit bangunan rumah di Kota Jambi, hanya terdapat 2.180 sertifikat Hak Milik, 1.560 kavling lahan HGB dan 51 kategori Hak Pakai. Kondisi demikian menggambarkan masih lemahnya status kepemilikan lahan di Kota Jambi, sehingga untuk menjamin Hak Kepemilikan Properti masyarakat perlu kebijakan yang mendorong upaya sertifikasi lahan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar properti yang mereka punyai memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih baik.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8Sub-das dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sample air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2017 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi: DO, Sulfida sbg (H₂S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap Tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada Tahun 2020 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 59%.

Tabel 2.40.

Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	22	22	22	22	24	24	24	29
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	4	4	4	5	5	5	9	9
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jumlah Dok	-	0	1	6	0	20	7	2
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jumlah Dok	-	8	37	44	17	36	18	59
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti									
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Penanganan sampah selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada Tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

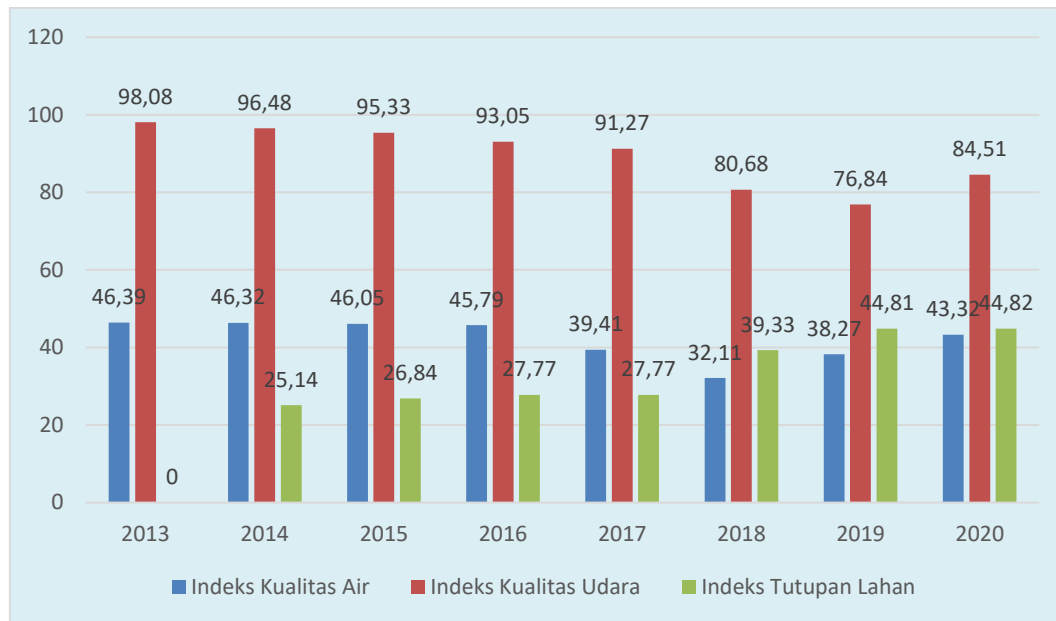
Tabel 2.41.

Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	332.150	370.475	378.670	406.397	410.260	438.520	454.148	459.891
2.	Volume Produksi Sampah	545.857	571.444	578.475	555.627	560.037	566.594	574.072	581.326
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60,85	64,83	65,46	73,14	73,26	77.35	79.11	79.77
4.	Jumlah TPS	335	366	402	443	455	445	445	445
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	n/a	836	906	994	1.018	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	597.043	604.923	611.353
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0,17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 8 Tahun terakhir berada di nilai 45-64 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E. Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 Tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 82.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021

Gambar 2.40.

Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013-2020
Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada Tahun 2020 sebesar 44,82, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada Tahun 2014 dan 2020 adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITL \times 40\%)$$

$$IKLH \text{ 2014} = (46,32 \times 30\%) + (96,48 \times 30\%) + (25,14 \times 40\%) = 52,89$$

$$IKLH \text{ 2017} = (43,32 \times 30\%) + (84,51 \times 30\%) + (44,82 \times 40\%) = 56,28$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks dari Tahun 2014 ke Tahun 2020 yaitu 52,89 menjadi 56,28 (kategori cukup).

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga. Hingga Tahun 2020, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 443.049 orang. Jika disandingkan dengan penduduk

dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el telah mencapai 98,74%. Kondisi ini meningkat dibandingkan Tahun 2013 yang hanya sebesar 74,55%.

Tahun 2020 bayi lahir 1 Tahun yang berakte kelahiran sebanyak 7.998 bayi dengan jumlah bayi lahir 8.286. Kondisi ini berfluktuasi setiap tahunnya karena kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013, dimana bayi lahir 1 Tahun yang berakte 9.191 bayi sedangkan bayi lahirnya 10.004. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memperoleh akta kelahiran. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Tahun 2013-2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42.

Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	9.191	9.116	8.327	8.287	183.991	229.944	254.387	7.998
2.	Jumlah kelahiran di Tahun bersangkutan	Jiwa	10.004	9.887	9.017	8.935	610.854	614.329	616.359	8.286
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	401.560	411.483	418.231	438.234	581.230	446.304	437.164	444.205
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	299.371	301.113	301.122	308.077	348.022	427.041	218.832	443.049
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	74,55	73,18	72,00	70,30	59,88	95,68	50,06	98,74
5.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	259.092	263.684	266.605	273.263	336.393	281.998	286.265	287.910
6.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	72.857	73.639	74.241	78.811	94.961	90.755	123.449	152.370

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.43.

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70	70	70	70	73	73	73	73

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	70	70	70	70	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)								
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)								
	a. Bidang Infrastruktur	0	22	202	324	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPMPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2021

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada Tahun 2020 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44.

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,06	2,04	2,05	2,05	2,06	2,30	2,40
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,96	78,11	74,34	71,27	42,25	73,50	61,06	61,06
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	25.275	23.627	91.431	tad	8.651	67.513	66.948	66.833
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	77,1	76,06	72,32	67,99	68,78	69,99	59,31	59,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45.

Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)								
	a. Terminal	6	6	5	5	2	2	2	2
	b. Pelabuhan								
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	6	6	5	5	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)								
	a. Jumlah total rambu (unit)	176	286	356	491	607	746	796	151
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	176	110	70	135	116	138	21	140
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	-	-	-	-	822	700	60	140
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-	76%	80%	85%
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan quadrill (%))	-	-	-	-	61%	61%	-	69,69%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)								
	a. Jumlah halte (unit)	-	-	1	-	2	-	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	891	856	859	-	3.341	2.292	2.218	10.000
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	329	441	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)	35	35	35	38	38	-	-	24
7.	Jumlah ATCS (unit)	-	-	-	-	-	5	3	6
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	-	-	-	13.826	12.769	1.243	841	658
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)								
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	195	237	262	403	414	455	457	202
11.	Jumlah korban kecelakaan								
	a. Meninggal	37	43	32	25	30	53	45	31
	b. Luka Berat	103	47	22	19	3	1	1	0
	c. Luka Ringan			379	656	655	723	661	291
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	143	155		263	433	534	815	464

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas tercatat 13.826 kasus. Jumlah kasus ini terus berkurang hingga hanya 658 kasus di Tahun 2020. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi sudah semakin membaik.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 45 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari Tahun 2013-2020.

Tabel 2.46.

Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji									
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	175	146	113	94	115	81	113	60
	b. Mobil Bus	Unit	1.150	1.861	894	863	805	813	617	458
	c. Mobil Barang	Unit	29.389	20.538	27.259	27.508	25.342	28.700	25.664	30.438
3	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)									
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	27	51	51	52	62	62	70	60
	b. Mobil Bus	Unit	401	446	457	466	478	489	498	395
	c. Mobil Barang	Unit	102.289	12.542	14.488	15.829	16.876	18.928	20.707	23.838
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	45	45	20	30
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum									
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	37.000	-	-	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus									
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	e. Biaya Denda	Rupiah								
	f. Buku Uji	Rupiah	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Sampung Uji (Cat)	Rupiah								
	h. Tanda Sampung Uji (Stiker)	Rupiah	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media online seperti website; media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.47.

Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Website milik Pemerintah Daerah	3	5	8	14	25	28	40	40
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	5,55	9,25	14,81	25,92	46,29	511,85	74,07	74,07
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui :								
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	-	-	-	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

Tabel 2.48.

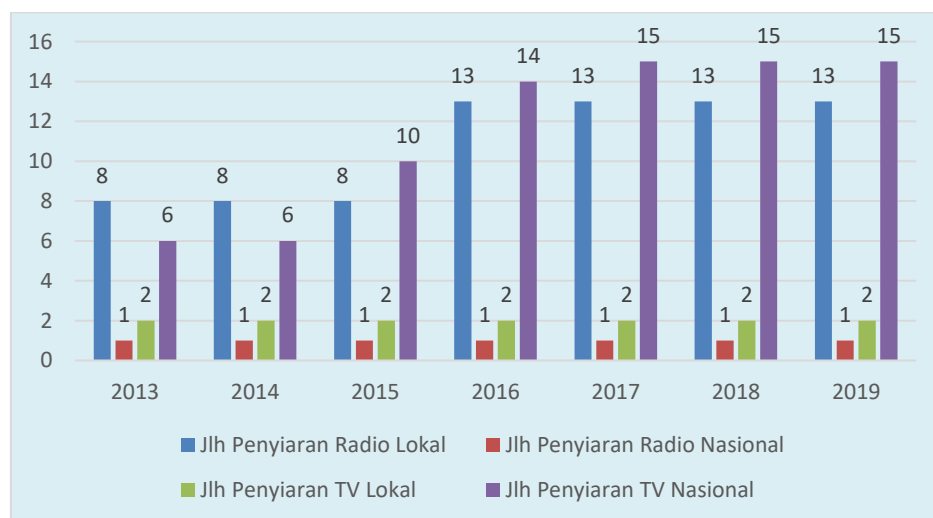
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15	15	15	15

2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32	32	32	32
Total		47	47	47	47	47	47	47	47

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2013 sampai dengan 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2016. Pada periode tahun tersebut semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang stagnan jumlahnya yaitu 1 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

Gambar 2.41.

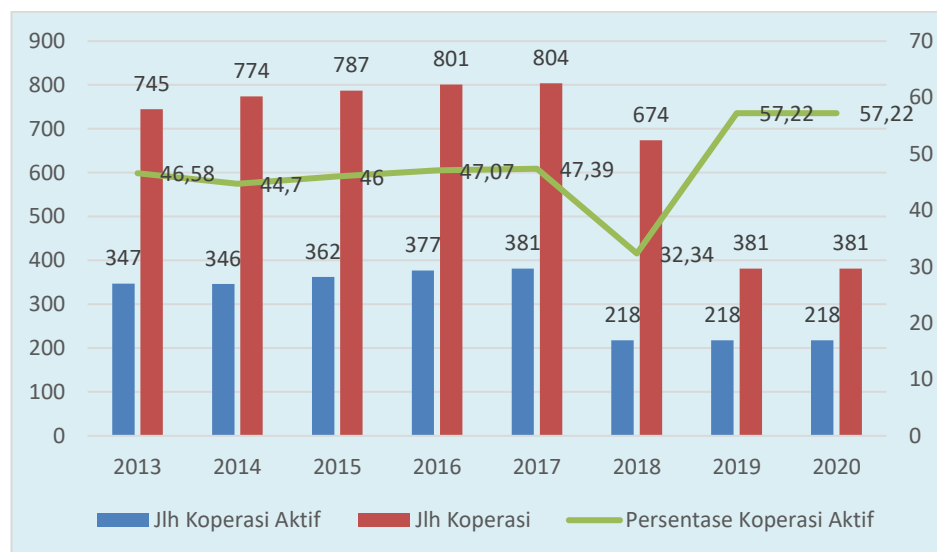
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013-2020 Kota Jambi

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dengan mendasarkan indikator koperasi aktif, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dari hasil verifikasi data koperasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi pada Tahun 2020, di Kota Jambi terdapat 381 koperasi, namun sebanyak 163 koperasi (42,78%) merupakan koperasi tidak aktif.

Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasannya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik, sesuai dengan visi Kota Jambi

Dari kondisi tersebut nampaknya perlu peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik. Disamping itu dalam rangka menyelaraskan visi Kota Jambi “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”, perlu pergeseran arahan pengembangan koperasi di Kota Jambi.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2021

Gambar 2.42.

Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan

menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada Tahun 2013 jumlah UMKM hanya sebesar 10.556 unit, tumbuh menjadi 10.763 unit pada Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/ijin. Walaupun demikian jumlah UMKM yang memiliki sertifikat meningkat signifikan yaitu sebanyak 6.517 unit pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2015 yang hanya 15 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai Tahun 2020 baru 0,0088% pelaku UMKM atau sebanyak 95 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.49.

Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.556	10.556	10.545	10.704	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0040	0,0047	0,0071	0,0070	0,0074	0,0078	0,0088	0,0088
		Unit	43	50	75	75	80	95	95	95
3.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/ sertifikasi	Unit / Tahun	-	-	15	58	335	539	1.200	6.517
4.	Persentase usaha mikro	%	-	-	-	-	-	77,61	49	50.39

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	menjadi usaha kecil									

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang pergudangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan. Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi menunjukkan kecenderungan meningkat. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2020 sebesar Rp 249,446 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi Tahun 2014 sebesar Rp 48 milyar.

Tabel 2.50.

Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Jambi 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	n/a	5	12	22	14	17	14	37
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	n/a	48	413,13	541,94	640,53	317,73	1.055,27	249,446
3.	Jenis Izin yang Dilayani	n/a	43	43	51	73	73	82	82
4.	Izin yang Diterbitkan	n/a	13.062	16.651	11.265	10.172	9.835	2.542	3.001

Sumber: DPMPSTP Kota Jambi, 2021

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih terbatasnya daya dukung infrastruktur dan suprastruktur perekonomian, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penataan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena

meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.51.
Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	(n/a)	87	160	957	2.859	2.909	8.731	8..837
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	(n/a)	5	12	22	14	17	432	1.253
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	(n/a)	87	91	96	143	116	20	7

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2021

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, pada Tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 87%, terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 91% dan 96% dan kemudian Tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 143%.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga (buah)	28	28	28	28	28	30	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	4	4	4	4	4	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28	30	32	32
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	15	15	15	14	20	50	50	79

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	1	6	6	6	6	6	6	4
6	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2021

2.3.2.14. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan urusan statistik di Kota Jambi telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik. Hasil dari pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Buku “Kota Jambi dalam Angka” sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Kota Jambi. Sejak Tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

2.3.2.15. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan

teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.53.

Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	1	1	1	2	2	2	3	31
2.	Persentase informasi yang terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	50	100	66,67	50	75	142	113	122

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2021

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kota Jambi difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan urusan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Adapun capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54.

Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	1	3	3	5	5	5	5	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	-	-	-	-	-	-	8	8
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2021

Kinerja pembangunan sektor kepariwisataan, seni dan budaya khususnya pada upaya pembangunan daya tarik wisata budaya (*cultural tourism*) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui kegiatan festival seni dan budaya serta kegiatan

pelestarian kawasan cagar budaya. Sebagai wilayah perkotaan, maka pengembangan pariwisata Kota Jambi harus focus pada pariwisata kota (*urban tourism*), sehingga aktifitas apresiasi terhadap seni dan budaya serta kawasan bersejarah (*heritage*) perlu ditingkatkan agar daya tarik wisatawan untuk berkunjung semakin meningkat. Harapan dari peningkatan kunjungan ini adalah peningkatan pengeluaran wisatawan yang berdampak *multiflier* pada ekonomi masyarakat.

2.3.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
 - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup:
 - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada Tahun 2013 hanya sebanyak 1.549 judul dan jumlah sebanyak 4.028 eksemplar mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2020 sebanyak 25.996 judul dan jumlah sebanyak 58.178 eksemplar. Untuk jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjung sebanyak 11.769 orang, meningkat pada tahun 2019 menjadi 32.423 orang. Namun di tahun 2020 tingkat kunjungan menurun drastis hal ini disebabkan adanya pandemi covid. Secara perbandingan jumlah penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dari hanya 0,72% pada tahun 2013 meningkat menjadi 9,59 pada tahun 2020.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan (buah)	1	1	1	1	1	1	370	301
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun (orang)	11.769	12.692	14.896	28.435	37.337	30.274	32.423	14.087
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	1.549	1.215	18.298	19.569	20.128	23.142	24.479	25.996
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eks)	4.028	1.863	41.326	44.639	46.180	50.021	55.352	58.178
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	614.329	615.675	606.200
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi(%)	0,72	0,33	7,17	7,65	7,81	8,14	8,99	9,59

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2021

2.3.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 Tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	-	1	12	6	5	5
2.	Jumlah SKPD	50	50	50	50	50	50	39	39
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	-	-	-	2	24	15	28	41

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2021

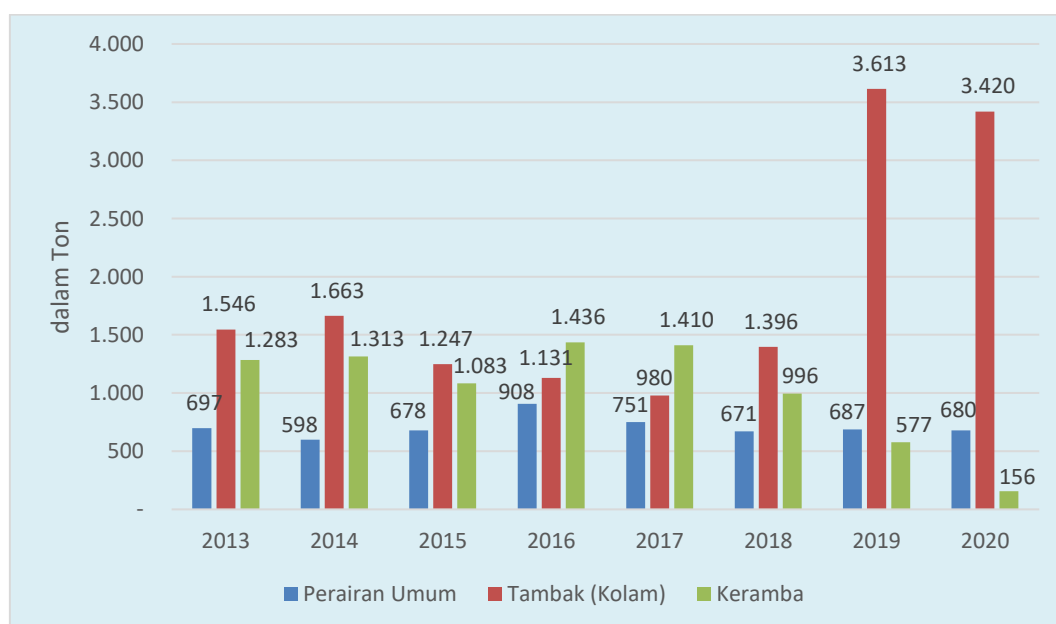
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun, pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 berada pada kisaran 0,06%-0,07%.

Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada Tahun 2020 sebesar 4.255,57 hektar, terdiri dari perairan umum 680,03 hektar, kolam 3.419,89 hektar dan Keramba 155,65 hektar. Produksi perikanan dalam kurun waktu Tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi walaupun kecenderungan meningkat. Produksi ikan pada Tahun 2013 sebesar 3.519,49 ton meningkat menjadi 4.255,57 ton pada Tahun 2017.



Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.43.

Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi
Tahun 2013-2020 (dalam Ton)

2.3.3.2. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional. Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya. Walaupun untuk saat ini Kota Jambi telah berupaya untuk mempromosikan Danau Sipin sebagai daerah objek wisata dengan melengkapi sarana dan prasarana seperti jogging track, perahu di seputaran Danau Sipin

Tabel 2.57.

Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40	2,36	2,38	-6,59
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	-	-	1	-	-	1	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	-	-	-	-	-	4	3
4.	Jumlah Restoran	Unit	Tad	Tad	479	527	617	672	710	872
5.	Jumlah Hotel									
	a. Berbintang	Unit	Tad	Tad	23	26	28	30	30	24
	b. Non Bintang	Unit	Tad	Tad	68	67	68	69	69	54

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2021

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 Tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2013 s.d. 2020 berada pada kisaran

2%, namun dengan adanya pandemi Covid di tahun 2020 maka kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,59%

2.3.3.3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.58.
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Padi	ton	9.577	7.186	2.012	4.383	5.510	6.243	3.920
2.	Produksi Palawija	ton	1.133	2.280	1.293	3.012	6.750	2.250	2.807,73
3.	Produksi Sayur-sayuran	ton	7.401	7.498	54.570	8.497,8	6.660	5.139	5.485,21
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	kwintal	26.912	27.291	34.329,85	28.010,5	10.328	5.108	496,52
5.	Produksi Daging	Kg	9.548.257	6.427.090	5.451.876	6.024.856	tad	6.577.008	5.108,196
6.	Produksi Telur	Kg	4.647.466	4.075.622	2.665.976	2.818.750	tad	1.688.596	189.300

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Produksi padi yang dihasilkan dalam Kota Jambi pada Tahun 2013 adalah sebesar 9.577,38 ton dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. dimana produksi padi tahun 2019 hanya sebesar 3.920 ton Jika dibandingkan Tahun 2013 berarti terjadi penurunan produksi sebesar 25.7%.

Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung tahun 2020 sebesar 351,5 ton, ubi kayu sebesar 6.294,5 ton, ubi jalar 95,28 ton, dan kacang tanah sebesar 54,08 ton. Data produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi tahun 2020 seperti jeruk siam 74,8 ton, alpukat 485,5 ton, pepaya 3.658,04 ton, pisang 2.037,49 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 486,05 ton dan 1.131,57 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

2.3.3.4. Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanya bersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pelindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2020 tercatat ada 20 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 6 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 1 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 2 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin /periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.59.

Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pasar yang diawasi									
	a. Pasar Tradisional	Unit	6	6	6	6	7	7	6	6
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Frekuensi	-	-	-	-	-	365 hari	365 hari	366 hari
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	24,85	26,46	28,17	29,64	30,24	30,75	31,48	-
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	4.121,00	5.021,86	5.999,14	7.233,21	7.952,23	8.896,45	9.712,78	-
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	19	19	21	21	20	20
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	-	-	-	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2021

2.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir. Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu Tahun 2013-2020 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.60.
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah IKM	Unit	-	-	2.403	2.884	2.990	3.120	3.562	4.162
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	-	-	-	402	792	390	407	45 IKM, 3 KUB
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	-	-	-	3	3	3	3	3
4.	Jumlah IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	-	-	20	30	45	34	52	4
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI	Unit	-	-	10	20	35	10	-	15
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	11,99	11,88	11,59	10,88	10,77	10,36	10,38	-
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	1.988,89	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.998,23	3.195,26	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap Tahunnya dari 2015 hingga 2020, yaitu dari 2.403 unit menjadi 4.162 unit. Namun, dari segi pertumbuhan mengalami perlambatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah IKM di Kota Jambi ini belum dibarengi dengan pembinaan maupun pemberian bantuan. Hal ini dilihat dari jumlah IKM yang mendapat binaan yang sangat rendah proporsinya dibandingkan jumlah IKM yang ada, pada Tahun 2015, yaitu tidak ada yang dibina dan Tahun 2020 sebanyak 45 IKM. Demikian halnya dengan jumlah produk IKM yang dipromosikan di Kota Jambi yang tergolong sangat sedikit, dimana Tahun 2015 hanya 20IKM yang mengikuti promosi produk dan Tahun 2020 hanya 4 IKM, artinya secara rata-rata hanya 6-7% IKM yang dibina mampu untuk mempromosikan produknya. Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama periode Tahun 2013-2020. Peningkatan sektor industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang setiap Tahunnya.

2.3.4. Urusan Penunjang

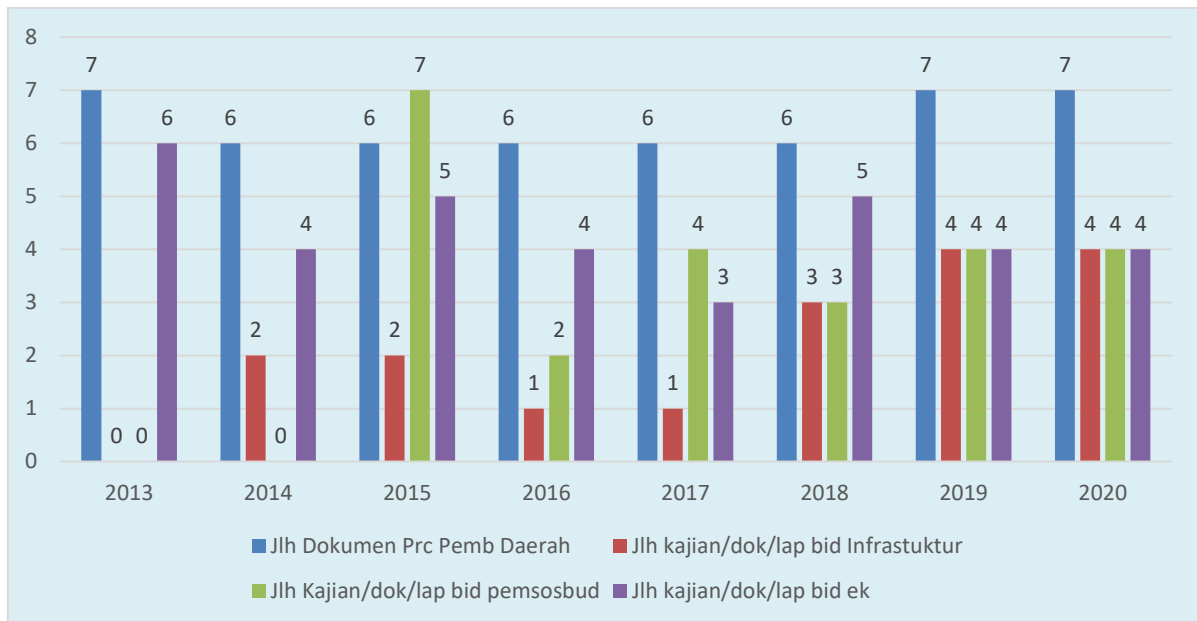
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 Tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 Tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap Tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap Tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahunberikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per Tahun yang telah disusun meningkat selama periode Tahun 2013-2020, yaitu dari 13 dokumen menjadi 14 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah lainnya.



Sumber : Bappeda Kota Jambi, 2021

Gambar 2.44.

Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2013-2020

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.61.

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah program RKPDP	54	54	54	54	54	59	67
2.	Jumlah program RPJMD	54	54	54	54	54	59	67
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPDP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2021

2.3.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2020, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 12,70% pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 21,93% pada Tahun 2020. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi

penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah : PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.62.

Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	41,81	42,71	52,12	49,31	56,85	58,37	41,89	53,20
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	12,70	18,50	19,00	18,30	26,50	20,85	23,15	21,93
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja Tahun sebelumnya (%)	12,87	10,90	11,90	8,50	9,00	11,55	13,37	9,94
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	85,64	87,19	85,45	86,04	89,54	89,95	89,86	91,20
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	112	125	86	91	102	100,89	103,06	96,24
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tad	WDP	Disclamer	WTP	WTP	WTP	WTP	Menunggu hasil
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	23,72	23,17	26,99	27,79	28,02	28,24	26,01	26,64
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	55,09	54,83	48,55	47,28	40,71	38,94	40,60	37,68
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2021

2.3.4.3. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

Pengembangan inovasi yang lahir dari program penelitian dan pengembangan mesti diarahkan dalam bentuk diversifikasi produk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan masing-masing urusan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan umum. Kebijakan seperti ini berimplikasi pada dorongan pelembagaan terhadap program dan kegiatan yang berbasis pada hasil penelitian dan pengembangan oleh masing-masing sektor.

2.3.4.4. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan *"merit system"* semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural). Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2013-2020 yang tersebar di 50 perangkat daerah.

Tabel 2.63.

Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN	Orang	8.134	7.902	8.030	6.886	6.581	6.326	6.213	5.816
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	1	16	13	8	10	26	5	7
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	175	380	416	323	319	333	327	347
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	3.608	4.493	4.602	3.855	3.722	3.640	3.689	3.516
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	2.978	1.622	1.635	1.445	1.307	1.1.84	1.087	937
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	164	126	122	108	97	79	70	91
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	0	0	1	0	2	10	5	0
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	15	0	11	19	19	15	5	0
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	80	0	0	0	7	29	30	30
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap Tahun	Orang	399	340	80	370	240	190	120	252
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	37	0	243	0	1	1	239	-
12.	Jumlah ASN pensiun setiap Tahun	Orang	308	160	245	364	343	317	442	329
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu Tahun yang ditangani	Kasus	55	52	88	40	36	36	35	26
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	65	80	88	90	95	95	97	97

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2021

2.3.4.5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Humas.

Tabel 2.64.

Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai LPPD	1,66 (sedang)	1,66 (sedang)	2,84 (tinggi)	3,06 (sangat tinggi)	Hasil blm keluar	2,9893	Hasil beum keluar	Hasil belum keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	11	12	16	16	5	7	10	10
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	25	51	42	80	5	88	66	78
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	-	3	1	1	5	4 perda 1 perwal	4 perda 3 perwal	1 perda 3 perwal
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKJiP	n/a	n/a	n/a	CC	B	B	B	Belum ada review
7.	Jumlah kerjasama daerah	12	11	7	13	23	29	52	37
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

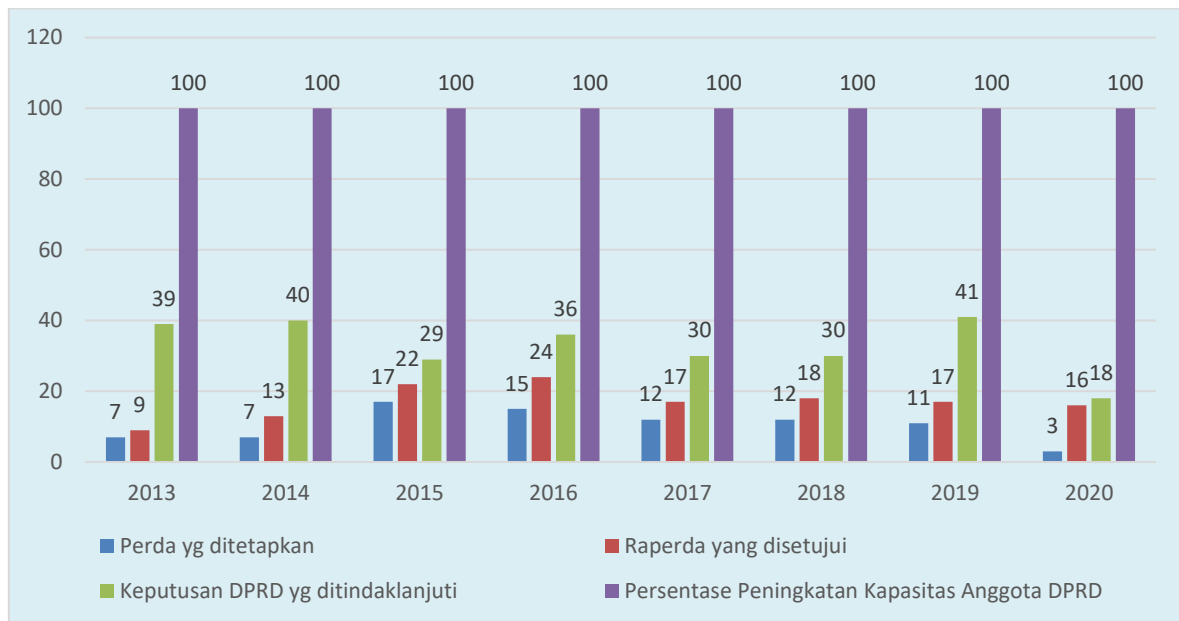
Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2021

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi tahun 2020 sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 6 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 7 anggota dari fraksi Gerindra, 4 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Nasdem, 5 anggota dewan dari fraksi PKS, 4 anggota dari fraksi Golkar dan 6 anggota dewan dari fraksi PBRB.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2021

Gambar 2.45.

Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2013-2020

2.3.4.7. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada Tahun 2017 mencapai 68 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai Tahun 2020, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 100%.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Jambi telah meraih skor 71,28. Dengan pencapaian skor tersebut artinya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.65.
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	75,0	71,9	66,7	66,2	64,52	60,07	60	66
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	56	96	96	89	68	322	430	401
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	10%	10%	20%	30%	40%	40%	40	88,23
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	N/A	N/A	N/A	Level II	N/A	Level II	Level III
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	N/A	58,27	55,09	55,74	71,28	55,74	71,28	N/A

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2013-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.66.
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Komponen Pengeluaran	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020**
Total Konsumsi Rumah Tangga								
ADHB (Miliar Rp)	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.212,68	15.432,00	16.415,75	17.584,80	17.679,42
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12.061,84	12.020,30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	64,58	63,69	61,63	58,24	58,69	56,74	57,08	59,30
Rata-rata konsumsi RT								
ADHB (Juta Rp)	80,63	89,73	96,04	102,69	110,05	115,70		
ADHK 2010 (Juta Rp)	68,68	71,26	73,71	76,06	78,95	80,94		
Rata-rata konsumsi Perkapita								
ADHB (Juta Rp)	18,81	21,28	22,78	24,36	26,11	27,45	29,08	28,92
ADHK 2010 (JutaRp)	16,02	16,90	17,48	18,04	18,73	19,20	19,95	19,66
Pertumbuhan								
Total konsumsi RT	4,76	3,76	3,44	3,19	3,81	2,51		
Perkapita	4,36	5,45	3,48	3,19	3,81	2,51		

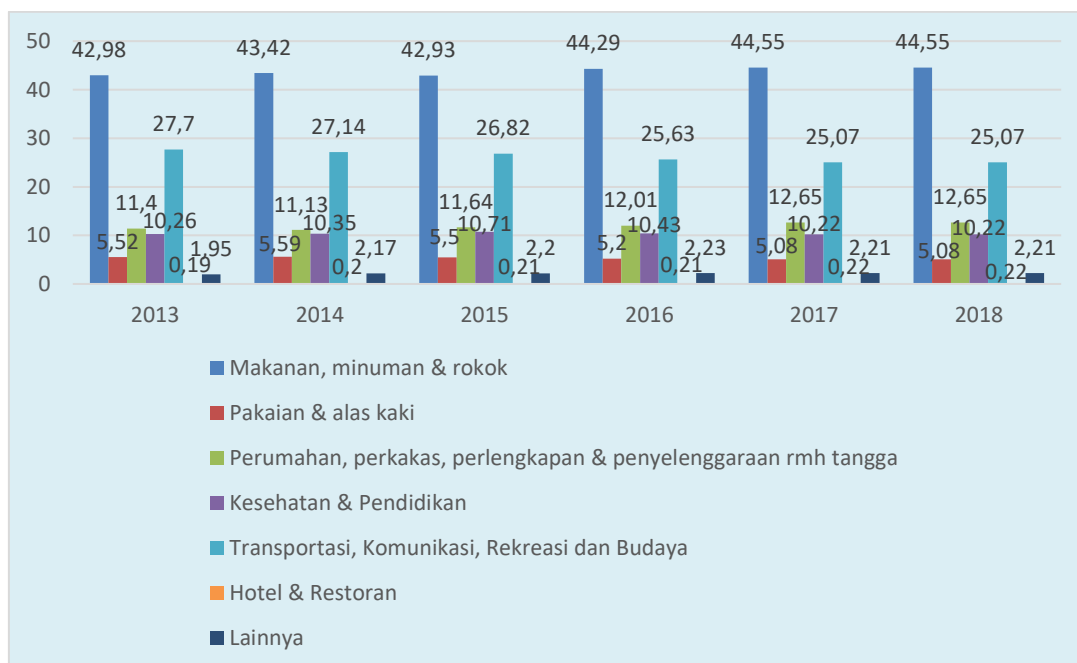
Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Selama periode 2013-2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 64,58 persen (2013); 63,69 persen (2014); 61,63 persen (2015); 58,24 persen (2016), 58,69 persen (2017), 56,74 persen (2018), 57,08 persen (2019) dan 59,30 pada tahun 2020. Posisi tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 64,58 persen dan terendah pada Tahun 2016 sebesar 56,74 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini

memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari Tahun ke Tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada Tahun 2013, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 80,63 juta Rupiah se Tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 89,73 juta Rupiah (2014); 96,04 juta Rupiah (2015); 102,69 juta Rupiah (2016); dan 110,05 juta Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 4,76 persen. Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 18,81% s.d 26,53%. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 2.46.

Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Secara rata-rata dari Tahun 2013 s.d 2018, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Jambi, bahwa konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 42,98 persen (2013); 43,42 persen (2014); 42,93 persen (2015); 44,29 persen (2016) dan 44,55 (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2020 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Akseibilitas Daerah

Tumbuh kembangnya suatu kawasan dalam perkotaan tentunya tidak akan terlepas dari peningkatan infrastruktur sebagai trigger, yang biasanya diawali melalui pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.

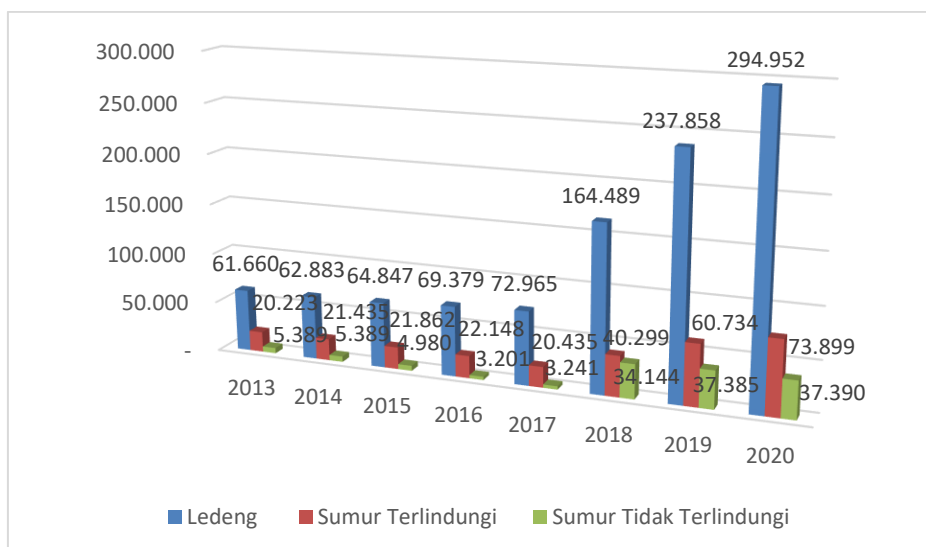
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (KM)	506,27	506,27	506,27	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan								
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2021

c. Ketersediaan Air Bersih

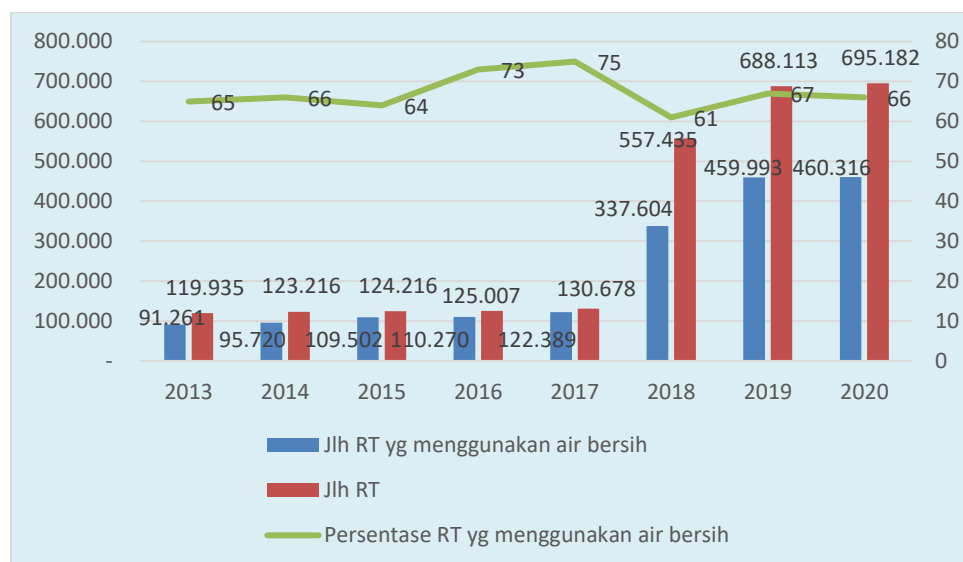
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam. Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga di kota Jambi dalam kurun waktu 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.47.

Sumber Air Bersih Rumah Tangga (RT) di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Dari gambar di atas terlihat penggunaan terbesar air bersih masyarakat Jambi berasal dari air ledeng sebesar 61.660 rumah tangga pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi 294.952 pengguna rumah tangga di tahun 2020. Untuk persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2013 – 2020 mengalami fluktuasi. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2021

Gambar 2.48.

Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2020

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada Tahun 2013 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 139.083 rumah tangga. Adapun pada Tahun 2020, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi 458.187 rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik selama kurun waktu delapan tahun terakhir ditampilkan pada berikut:

Tabel 2.69.

Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga	139.083	142.016	144.017	145.872	147.784	557.435	688.113	695.182
2.	Jumlah Pelanggan PLN	290.887	290.887	371.983	247.105	428.587	502.139	533.711	562.793
3.	Rasio Elektrifikasi	209%	205%	258%	169%	290%	90,08%	77,56%	80,96%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70.

Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2020

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4 Hari Kerja	-	Gratis
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4 Hari Kerja	-	Gratis

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4 Hari Kerja	8 dokumen	Gratis
6.	Izin Usaha Pusat Perbelajaan (IUPP)	4 Hari Kerja	13 dokumen	Gratis
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4 Hari Kerja	7	disesuaikan
8.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	4 Hari Kerja	5	disesuaikan
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	7	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4 Hari Kerja	7	Gratis

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2021

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 216.815.393.479,- atau hanya tercapai sebesar 93,43% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 232.060.000.000,- selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.479.596.104 atau melebihi target 110,55% sebesar Rp. 36.618.000.000,-. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir

Tabel 2.71.

Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pajak Daerah						
	Target	190.882.000.000	187.252.000.000	198.940.000.000	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000
	Realisasi	147.889.448.423	158.740.884.099	201.429.136.841	215.444.433.949	256.028.625.688	216.815.393.479
	Persentase	77%	85%	101%	105,87%	105,76%	93,43%
2.	Jumlah Retribusi						
	Target	63.057.026.000	73.679.471.000	46.403.840.000	44.012.000.000	45.068.647.000	36.618.000.000
	Realisasi	58.812.352.554	80.679.063.851	43.077.425.944	40.389.059.087,29	38.541.261.596	40.479.596.104
	Persentase	93%	110%	93%	91,77%	85,22%	110,55%

Sumber : BPS Kota Jambi, 2021

c. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan Tahun 2020 tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus

globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2.72.

Jumlah Kasus Kejahatan Di Kota Jambi Tahun 2014-2020

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kejahatan	778	1.058	1.039	6.959	5.806	6.021	3.890
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana				38,08%	54,48%	63,33%	63,01%

Sumber: Polresta Jambi, 2021

d. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.73.

Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Demonstrasi Politik	-	10	-	tad	Tad	6	-	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	280	158	65	tad	Tad	-	5	2
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	-	-	tad	Tad	-	1	-
Jumlah		280	168	65	tad	Tad	6	6	2

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2021

2.4.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2013 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 248.761 meningkat menjadi 307.022 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 296.275. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Pengangguran				
2013	230.243	18.518	248.761	160.376	60,80	7,44
2014	235.722	26.569	262.291	158.137	62,39	10,13
2015	254.351	20.098	274.449	154.093	64,04	7,32
2016	<i>BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016</i>					
2017	268.264	15.754	284.018	159.325	64,06	5,55
2018	277.809	19.488	297.290	154.575	65,79	6,56

2019	283.387	20.635	307.022	15.340	66,84	4,19
2020	26.205	31.008	296.275	462.029	64,12	10,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari iklim investasi yang kondusif yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi Tahun 2013 sebesar Rp. 1.300.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.900.000 per pekerja per bulan pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan positifnya pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 mencapai 10,49% mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dunia mengalami pandemi Covid sehingga kondisi ini ikut berimbas pada kondisi tenaga kerja di kota Jambi. Karena adanya beberapa kebijakan dalam menghadapi pandemi ini sehingga perekonomian mengalami kelesuan sehingga banyak pekerja yang di PHK. Beberapa kebijakan di gelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pengangguran.

Tabel 2.75.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	52.594	53.778	54.668	55.491	Tad	45.329	47.389	50.270
2.	Jumlah lulusan S2	4.382	4.490	4.556	4.610	Tad	3.892	4.135	4.394
3.	Jumlah lulusan S3	392	402	406	409	Tad	269	279	370
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	59.381	60.694	61.645	62.526	Tad	49.490	52.253	55.034
5.	Jumlah penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	614.329	616.355	620.708
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	1.067,36	1.068,44	1.070,10	1.071,59	Tad	805,59	847,77	886,64

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

b. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio*/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) Tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per Tahun 2020, rasio ketergantungan Kota jambi berada pada angka 43,68 dimana angka ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 40,02. Hal ini

menunjukkan perkembangan yang kurang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.76.
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2013-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	148.672	148.302	147.899	147.302	147.827	155.255
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	20.828	21.826	22.947	24.149	5.014	29.040
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	169.500	170.128	170.846	171.491	172.841	84.295
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	406.566	413.359	420.288	426.612	431.897	421.905
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	41.69	41.16	40.64	40,20	40,02	43,68

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

2.4.5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah dalam tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020	Perangkat Daerah PJ
Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	98,46%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	87,45%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	90,76%	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20,47%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan	123,11%	Dinas Kesehatan

		skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	28,94%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	42,53%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	50,27%	Dinas kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45,70%	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	104,41%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	37,98%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	41,63%	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum				

1	Penyediaan Kebutuhan pokok air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	70,99 %	Dinas PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,50 %	Dinas PUPR
Perumahan Rakyat				
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Jumlah warga negara yang memperoleh Kualitas lingkungan Permukiman Perkotaan	100%	Dinas Perkim
2	Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Penyelenggara Perumahan yang mendapat Fasilitas	100%	Dinas Perkim
3	Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Jumlah Permukiman yang mendapat Utilitas Umum	100%	Dinas Perkim
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah korban kebakaran yang bisa diselamatkan	100%	Dinas Damkar
2	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Jumlah masyarakat yang diselamatkan pada kondisi darurat non kebakaran	100%	Dinas Damkar
Satuan Polisi Pamong Praja				
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	Satpol PP
Urusan Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti	68,81%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi	68,81%	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota jambi	Jumlah Korban bencana daerah yang tertangani	100%	Dinas Sosial

2.4.6. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang selesai akhir tahun 2015.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu : Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Pelaksanaan TPB di Kota Jambi sebagai berikut :

- Angka kemiskinan meningkat dari 8,12% pada 2019, menjadi 8,27% pada 2020.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 94,03 pada 2020, tertinggi se Provinsi Jambi

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki sebesar 81,90 dan IPM perempuan sebesar 77,01
- Angka harapan hidup meningkat dari 71,57 (2019) menjadi 72,65 (2020)
- Angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,9 pada 2019, menjadi 15,1 (2020)
- Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 6,53 (2019) menjadi 10,49 pada 2020
- Sebanyak 99,69% rumah tangga sudah memiliki sumber penerangan listrik dari PLN, sementara 0,31% lainnya bersumber dari non PLN.
- Sebanyak 0,15% rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat buang air besar. Angka ini adalah yang terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi